

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR  
GURU SERTIFIKASI  
DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas  
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan

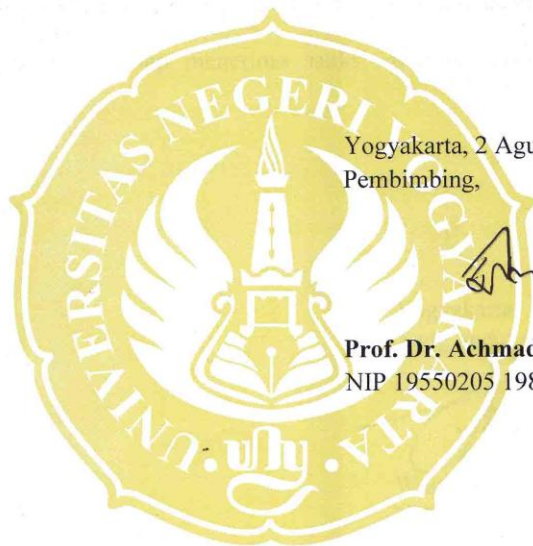


Oleh  
Wakit Nurdiansah  
NIM 09110244015

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
AGUSTUS 2016**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA” ini, telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan.



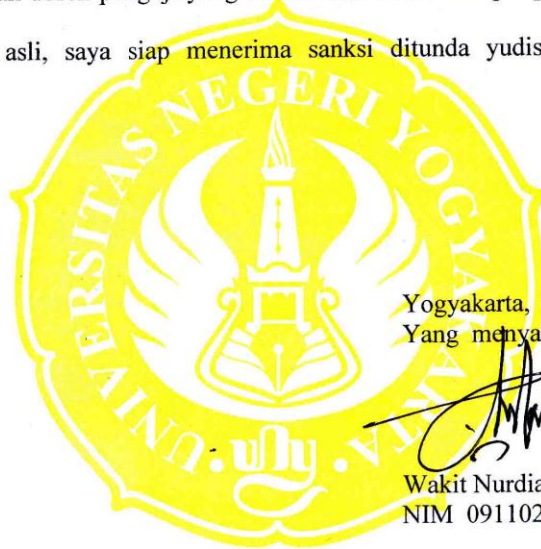
Yogyakarta, 2 Agustus 2016  
Pembimbing,

**Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum**  
NIP 19550205 198103 1004

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.



Yogyakarta, 25 Agustus 2016  
Yang menyatakan,

Wakti Nurdiansah  
NIM 09110244015

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA” yang disusun oleh Wakti Nurdiansah, NIM. 09110244015 ini telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 12 Agustus 2014 dan dinyatakan lulus.

## DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Acmad Dardiri, M. Hum	Ketua Penguji		25 / 2016 / 08
Drs. L. Hendrowibowo, M. Pd	Sekretaris Penguji		25 / 2016 / 08
Dr. Wiwik Wijayanti, M.Pd	Penguji Utama		25 / 2016 / 08

Yogyakarta, 03 OCT 2016  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 001

## **MOTTO**

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu.

Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”

(Mario Teguh)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Evelyn Underhill)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan anugerah-Nya, karya ini ku persembahkan untuk:

1. Nusa, Bangsa, dan Agama
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a di setiap ibadahnya, dorongan moril dan materil selama ini hingga kini penulis berhasil menyusun karya tulis ini.
3. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR  
GURU SERTIFIKASI  
DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

Oleh  
Wakit Nurdiansah  
NIM 09110244015

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta, pendapat guru sertifikasi, faktor penghambat, faktor pendukung dan solusi pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan subjek penelitian yang meliputi guru sertifikasi, kepala sekolah dan dinas pendidikan yang menangani sertifikasi guru. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman dalam pemenuhan jam mengajar guru mampu memenuhi jumlah jam sesuai jumlah rombongan belajar dan daya tampung guru yang mencukupi; (2) Pemenuhan jam mengajar guru yang kurang memenuhi guru mencari di sekolah lain serta mendapat tugas khusus yang sesuai dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009; (3) Faktor pendukung pemenuhan jam mengajar di sekolah berupa jumlah guru yang mencukupi, jumlah rombel yang cukup serta tugas tambahan khusus sesuai ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009; (4) Faktor penghambat berupa jumlah guru yang sedikit, jumlah rombongan belajar juga tidak memenuhi dan jarak satu sekolah satu dengan yang lain yang cukup jauh sehingga tenaga, waktu dan biaya yang lebih; (5) Solusi mengatasi pemenuhan jam mengajar dengan meningkatkan jumlah guru serta memperbanyak jumlah rombongan belajar perkelasnya.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru, Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang sungguh tak terkira sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesabaran untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta” ini dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung dan secara tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta mensukseskan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penuli mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Ketua Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Prodi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyetujui skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Acmad Dardiri, M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, atas bimbingan, dukungan, bantuan, dan kesabarannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak/Ibu seluruh Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama masa studi.
5. Bapak Drs. Aragani Mizan Zakaria, M. Pd. selaku Kepala Sekolah beserta segenap tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



7. Teman-teman Program Studi Kebijakan Pendidikan angkatan 2009 atas dukungan yang diberikan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka segala saran, kritik, dan masukan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis dan umumnya bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 25 Agustus 2016  
Penulis,



Waki Nurdiansah  
NIM 09110244015

## DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	11
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	11
2. Kebijakan .....	13
1) Kebijakan .....	13
a) Pengerttian Kebijakan .....	13
b) Proses Kebijakan.....	14

1) Tahap Formulasi Kebijakan .....	15
2) Tahap Adopsi Kebijakan.....	16
3) Tahap Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	16
4) Tahap Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	17
2) Kebijakan Pendidikan .....	17
B. Sertifikasi Guru .....	19
1. Pengertian Sertifikasi Guru .....	19
2. Landasan dan Dasar Hukum Pelaksanaan.....	21
3. Prosedur Sertifikasi .....	24
4. Pembagian Jam Mengajar Guru .....	26
C. Penelitian yang Relevan.....	26
D. Kerangka Berfikir.....	28
E. Pertanyaan Penelitian .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	32
B. <i>Setting</i> Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Analisa Data.....	39
G. Keabsahan Data.....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi .....	44
1. Sejarah.....	44
2. Profil Sekolah.....	44
3. Visi dan Misi .....	45
4. Daftar Peserta Didik .....	47
5. Daftar Pendidik .....	47
B. Hasil Penelitian .....	48
1. Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman.....	48
2. Jam Tambahan Mengajar Guru Sertifikasi di Luar Jam Mengajar Mata Pelajaran khusus.....	51
3. Faktor Pendukung dalam Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi.....	54
4. Faktor Penghambat untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi.....	57
5. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi.....	60
C. Pembahasan.....	64

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA .....	76
----------------------	----

LAMPIRAN .....	78
----------------	----

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Kisi-Kisi Pedoman Observasi .....	37
Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara .....	38
Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi.....	38
Tabel 4. Jumlah Peserta Didik .....	47
Tabel 5 Daftar pendidik .....	47

## DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik .....	15
Gambar 2. Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif.....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Catatan Lapangan .....	78
Lampiran 2. Pedoman Observasi, Dokumentasi dan Wawancara .....	94
Lampiran 3. Transkrip Wawancara .....	98
Lampiran 4. Dokumen Foto .....	118
Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian .....	121

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh sektor kehidupan, sebab kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat pendidikan. Peran sekolah dinilai sangat penting bagi maju dan berkembangnya masyarakat dan terjaminnya kebutuhan kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Sebagai upaya yang bukan saja membuahkan manfaat yang besar, pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sering dirasakan belum memenuhi harapan.

Guru merupakan sosok yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pengembangan segenap potensi peserta didik. Ia menjadi orang yang paling menentukan dalam perencanaan dan penyiapan proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam keluarga guru berkedudukan sebagai pelindung, pendamping, pendorong, penasehat, dan pemberi contoh anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Kedudukan guru di sekolah utamanya adalah sosok guru profesional yang bertugas di jenjang pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi yang menentukan dalam pengaturan pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang dicapai siswa. Oleh karena itu guru merupakan sosok yang amat menentukan proses berlangsung dan keberhasilan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.



Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa (1) setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang- undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Selain UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) seperti yang tertera di atas, pemerintah juga menjamin pendidikan bagi warga Negara Indonesia

yang tertera pada Peraturan Pemerintah NO. 47 Tahun 2008 pasal 9 tentang Penjaminan Wajib Belajar yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Pada bidang pendidikan semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Pendidikan bukan hanya sekedar menghidupi peserta didik tetapi juga mengembangkannya sebagai manusia (*human being*). Pendidikan nasional bukanlah bertujuan untuk melahirkan robot-robot yang hanya menerima petunjuk dan restu dari atas tetapi pendidikan yang mengembangkan pribadi-pribadi yang kreatif, kritis, dan produktif (H.A.R. Tilaar, 2004: 11-12).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang [Guru dan Dosen](#) pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu”.

Mulyasa (2007:33) mengatakan, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga profesional, sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Jadi sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk

mengungkapkan penguasaan kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2007:33).

Syafruddin & M. Basyiruddin (2003 : 24) berpendapat kepribadian seorang guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena disinilah muncul tanggung jawab guru sekaligus menjadi kekuatan dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya pemerintah terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalisme guru harus diarahkan pada dua hal tersebut (E.Mulyasa, 2007 : 13).

Guru memiliki empat aspek kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, personal dan profesional. Kompetensi pedagogik menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kompetensi yang harus dimiliki selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini merupakan salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang baik pada diri sendiri, bersikap bijaksana serta arif, bersikap dewasa dan berwibawa serta mempunyai akhlak mulia

untuk menjadi sauri teladan yang baik. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi professional merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh guru yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi terakhir yang harus dimiliki adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik melalui cara yang baik dalam berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga kependidikan atau juga dengan orang tua /wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Keempat aspek tersebut adalah pilar profesional yang terkait dengan kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru yang biasa dikenal dengan istilah sertifikasi guru. Sertifikasi guru diharapkan mampu memberikan dorongan bagi guru untuk memiliki kompetensi yang menjadi tuntutan tersebut (Novi Fitriyaningsih : 2011).

Surat keputusan bersama (SKB) 5 menteri yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama Nomor 05/X/Pb/2011, Nomor Spb/03/M.Pan-Rb/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/Pmk.01/2011, Dan Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. SKB ini disusun untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional (Sekjen Kemendikbud, 2011:4).

Perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu kepada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka (untuk SMA dan SMK) ke dinas pendidikan kabupaten/kota (Sekjen Kemendikbud, 2011:11).

Menurut Menteri Kemendikbud, Mohammad Nuh (2009-2015) guru di Indonesia ini sejatinya mencukupi. Akan tetapi gara-gara ada ketimpangan distribusi, maka ada sekolah di sekolah tertentu kekurangan guru. Bahkan, ada mata pelajaran tertentu di suatu sekolah kekurangan guru. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim menjelaskan, Surat Keputusan Bersama 5 menteri juga dibuat untuk menjawab keluhan dan permasalahan yang terkait distribusi guru. Sebab, di beberapa daerah seringkali di temukan jumlah guru yang melebihi kebutuhan, sedangkan di daerah lainya justru kekurangan guru.

Namun SKB ini menimbulkan penolakan terutama dari guru. Guru resah karena ada tuntutan mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu (Silaban, 2012: 1). Keresahan ini muncul karena dengan SKB lima menteri ini, beban mengajar guru benar-benar diberlakukan untuk tatap muka minimal 24 jam per minggu dan maksimal 40 jam per minggu. Padahal sebelum diberlakukan SKB ini, guru bersertifikat yang mengajar tatap mukanya kurang dari 24 jam per minggu masih dapat memenuhi dengan

tugas-tugas tambahan di luar kelas seperti pembimbing ekstrakurikuler, wali kelas dan tutor paket A, B serta C (Kompas, 2012:1).

Seperti halnya di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta sebagian guru terpaksa harus mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi beban kerja minimal mereka. Adapun salah satu indikator profesionalisme guru antara lain adalah guru tersebut mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Jumlah guru yang tidak merata juga telah mempersulit guru untuk memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka seminggu. Akibatnya para guru menjadi semakin sulit memenuhi jam wajib mengajar mereka minimal 24 jam tatap muka seminggu. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Kualitas pendidikan yang semakin rendah akan diperparah dengan kewajiban beban kerja minimal 24 jam mengajar bila tidak terpenuhi. Tentu ini akan membuat semangat kerja guru menjadi terganggu. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis ingin meneliti dan mengkaji mengenai **:"Implementasi kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta"**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain :

1. Jumlah jam mengajar dalam rombel melebihi ketentuan.

2. Guru memenuhi jam mengajar di luar sekolah.
3. Jam mengajar guru di sekolah kurang.
4. Penataan dan pemerataan guru kurang.
5. Semangat kerja guru sertifikasi berkurang

### **C. Pembatasan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan dalam identifikasi masalah, banyak permasalahan yang dihadapi dan tidak mungkin dapat dijelaskan seluruhnya, mengingat keterbatasan kemampuan metodologi penulis, biaya dan waktu penelitian, sehingga penelitian membatasi tentang implementasi dan permasalahan dalam pemenuhan jam mengajar bagi guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta guna memenuhi jam disekolah lain.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan jam mengajar guru di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta?
2. Apasajakah permasalahan yang dihadapi guru bersertifikasi dalam pemenuhan jam mengajar guru di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemenuhan jam mengajar guru di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi guru bersertifikasi dalam pemenuhan jam mengajar di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan serta memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga khususnya untuk mengetahui bagaimana pemenuhan jam mengajar bagi guru sertifikasi maupun dalam teknik-teknik penelitian yang penulis lakukan.



b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan saran, kritik konstruktif atau berupa saran yang membangun khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mencari solusi terhadap proses pemenuhan jam mengajar guru serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya meningkatkan kualitas guru.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian yang selanjutnya guna memperluas pemahaman dan memperdalam pengetahuan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan**

##### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Menurut pandangan ahli-ahli dalam ilmu sosial, proses implementasi suatu kebijakan (pendidikan) berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut (Arif Rohman, 2009 : 133).

Secara etimologis pengertian implemetasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2005:64) adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *dan to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sedangkan pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Solichin Abdul Wahab (2005:65) adalah :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Implementasi sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), sehingga pengertian di atas mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri dan sebagainya (Kamus Besar Webster dalam Arif Rohman, 2009 : 134).

Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009 : 135) dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: (1) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa dijalankan, (2) interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, (3) aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

## **2. Kebijakan**

### **a. Pengertian kebijakan**

Kebijakan (*policy*), juga seringkali disebutkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kedua istilah ini, mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun demikian, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Arif Rohman (2009 : 107) mengatakan suatu kebijakan kadang dipahami secara berbeda-beda. Untuk yang pertama, kebijakan dianggap sebagai tindakan yang harus dipilih untuk menyelesaikan masalah (*policy*) disisi lain kadang kebijakan dipahami sebagai kebijaksanaan karena tindakan yang dipilih harus bijaksana (*wisdom*).

Kebijakan merupakan sebuah rekayasa sosial (*social engineering*). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah. Tentu saja rumusan kebijakan ini secara esensial sesuai dengan permasalahan yang ada (Sudiyono, 2007 : 1)

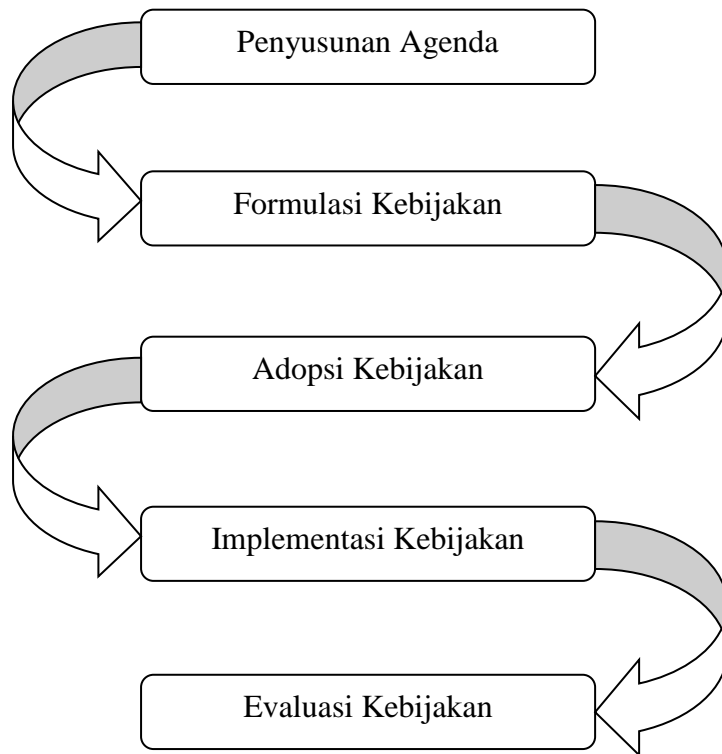
H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008, 2007 : 140) menambahkan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan pendidikan

dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Kebijakan sebagai suatu program yang berorientasi pada pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah berasal dari pemerintah atau organisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan keputusan atau tindakan yang dihasilkan oleh pemerintah atau organisasi yang dianggap sah guna menyelesaikan masalah dan juga mengatur berbagai tindakan anggota atau masyarakat untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.

#### **b. Proses kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, para ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik.



Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik

Sumber : William N. Dunn 2003:25

### 1) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama saja halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-

masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan terbaik.

## **2) Tahap Adopsi Kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas perumus kebijakan, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

## **3) Tahap Implementasi Kebijakan**

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### **4) Tahap Evaluasi Kebijakan**

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang diambil dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan (Budi Winaryo, 2007 : 32-34)

### **3. Kebijakan pendidikan**

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kali didengar, dilakukan, tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengaturan kehidupan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Oleh sebab itu kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi (Tilaar & Riant Nugroho, 2009: 16).



Kebijakan pendidikan dipahami dalam dua makna yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Pemahaman kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri-ciri kebijakan publik. Adapun ciri kebijakan sebagai kebijakan publik di antaranya adalah:

- a. Kebijakan tersebut dibuat oleh negara/lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- b. Kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama (kehidupan publik)
- c. Mengatur masalah bersama
- d. Memberi manfaat bagi masyarakat, dan untuk mencapai tujuan bersama (Tilaar & Riant Nugroho, 2009: 264-265)

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Dalam ensiklopedia Wikipedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta

rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan (Arif Rohman, 2009: 109).

Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi-misi pendidikan yang dirumuskan dari pertimbangan pakar dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam komponen kebijakan pendidikan mengandung tujuan (*goal*), rencana (*plans*), program (*programme*), keputusan (*decision*), serta dampak (*effects*) suatu kebijakan (Arif Rohman, 2009:119).

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan juga misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2009: 140).

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang pendidikan dan keputusannya berasal dari perumusan langkah-langkah strategis guna mengatasi masalah di bidang pendidikan.

## **B. Sertifikasi Guru**

### **1. Pengertian Sertifikasi Guru**

Martinis Yamin (2006 : 2) berpendapat sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen

sebagai tenaga profesional. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 11 sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.

E. Mulyasa (2007 : 33) mengatakan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga profesional, sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Sertifikasi diharapkan menjadikan guru sebagai pendidik profesional, yaitu berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidikan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidikan yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, guru berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok (Masnur Muslich, 2007 : 7).

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah dalam proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki

kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmanai dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

## **2. Landasan dan Dasar Hukum Pelaksanaan**

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal 1 ayat 11 dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.

Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran di Indonesia memang diwajibkan memenuhi tiga persyaratan yaitu kualifikasi pendidikan minimum, kompetensi dan sertifikasi pendidik.

Kaitan ketiga persyaratan untuk guru di atas dapat diperjelas dengan isi pasal 1 ayat 12 UUGD yang menyebutkan bahwa

sertifikat pendidikan merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sementara itu, pada pasal 11 ayat 1 juga disebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat, yaitu kualifikasi minimum yang ditentukan (diploma D-4/S1) dan terbukti telah menguasai kompetensi tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 52 ayat 2 menyebutkan bahwa beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pada ayat 3 pasal 52 disebutkan bahwa pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 jam tatap muka dalam satu minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru.

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan serta Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, peraturan-peraturan inilah yang dijadikan

landasan bagi pemerintah, khususnya Kemdikbud RI dalam menentukan kebijakan-kebijakan lainnya.

Setiap guru yang telah tersertifikasi wajib melaksanakan beban kerja 24 jam mengajar ini karena bagi guru yang sudah tersertifikasi beban kerja menjadi salah satu syarat mendapatkan tunjangan profesi. Dalam PP nomor 2008 dijelaskan mengenai syarat mendapatkan tunjangan professional yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen.
- b. Memenuhi beban kerja guru.
- c. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- d. Terdaftar pada Departemen sebagai Guru tetap
- e. Berusia paling tinggi 60 tahun.
- f. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi adalah memenuhi beban kerja guru. Jika dirunut dengan ketentuan pada PP nomor 74 maupun Permendiknas nomor 39 tahun 2009 yang dimaksud memenuhi beban kerja guru adalah minimal 24 jam mengajar. Jika guru tidak

memenuhi beban kerja minimal 24 jam mengajar tersebut maka konsekuensinya adalah tidak mendapatkan tunjangan professional.

### **3. Prosedur Sertifikasi**

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (2007) mengatakan Portofolio dinilai oleh LPTK penyelenggaraan guru yang dikoordinasikan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).Unsur KSG atau LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) terdiri dari Ditjen DIKTI dan Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan). Prosedur sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

- 1) Guru dalam peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pedoman penyusunan portofolio guru.
- 2) Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut.
- 3) Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi terdiri atas LPTK induk dan sejumlah LPTK Mitra.
- 4) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.

- 5) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut:
- a) Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.
  - b) Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian, materi DPG mencakup empat kompetensi guru.
  - c) Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggaraan dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio.
  - d) Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh sertifikat pendidik.
  - e) Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan kabupaten / kota.
- 6) Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- 7) DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.



#### **4. Pembagian Jam Mengajar Guru Sertifikasi**

Dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2009 ini, di antaranya mengatur tentang jumlah beban mengajar wajib bagi guru, tugas tambahan guru, guru layanan khusus dan lain-lainnya. Sedangkan pada Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 hanya merubah pada pasal 5 dari Permendiknas No. 39 Tahun 2009 sebelumnya. Berikut ini isi utama / gabungan dari Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tersebut.

#### **C. Penelitian yang Relevan**

##### **1. Agus Suroyo (2010)**

Penelitian yang berjudul “Implikasi Kebijakan 24 Jam Mengajar terhadap Optimalisasi peran Guru PAI dalam Proses Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari” tersebut dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Kebijakan yang diambil para pengambil kebijakan terkait masalah 24 jam mengajar adalah, Mapenda Kementrian Agama Gunung kidul mengambil kebijakan meningkatkan kegiatan di madrasah, meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru: Kepala MAN Wonosari mengambil kebijakan memberi jatah 24 jam mengajar bagi guru yang tersertifikasi, mengurangi Guru tidak tetap dan melakukan koordinasi dengan madrasah swasta untuk menampung guru yang kekurangan jam mengajar. (2)

implementasi kebijakan 24 jam mengajar di MAN Wonosari belum sepenuhnya mengacu perundang-undangan yang berlaku. (3) kebijakan 24 jam mengajar berimplikasi positif terhadap peranan guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pembimbing, motivator, pengelola pembelajaran dan evaluator di dalam kelas. Dengan demikian berarti kebijakan 24 jam mengajar tidak menjadi kendala untuk mengoptimalkan peran guru PAI MAN Wonosari dalam proses pembelajaran.

## **2. Novi Fitrianingsih (2011)**

Penelitian yang berjudul “Studi Komparasi Kinerja antara Guru Sertifikasi dan Guru Non Sertifikasi dalam Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Pecangan Jepara” tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun hasil dari data yang telah didapat dianalisis dengan analisis uji t dengan satu variabel yaitu kinerja guru, dimana kinerja guru yang dimaksud adalah kinerja guru sertifikasi dan kinerja guru non sertifikasi. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa hipotesis alternatif ditolak artinya hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara guru sertifikasi dan guru non sertifikasi dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Pecangan Jepara. Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kinerja guru sertifikasi termasuk dalam kategori baik sekali yaitu berada pada interval 101-125 dengan nilai rata-rata sebesar 101,4. (2) Kinerja guru non sertifikasi termasuk

dalam kategori baik yaitu berada pada interval 76-100 dengan nilai rata-rata sebesar 93,1. (3) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja guru sertifikasi dan guru non sertifikasi dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Pecangan Jepara ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  (1,693) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  untuk taraf signifikansi 5% (1,734) maupun  $t_{tabel}$  untuk taraf signifikansi 1%.

#### **D. Kerangka Pikir**

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang [Guru dan Dosen](#) pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa [beban kerja guru](#) mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Guru yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung dengan para siswa di kelas melalui proses belajar mengajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 52 ayat 2 menyebutkan bahwa beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pada ayat 3 pasal 52 disebutkan bahwa pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling

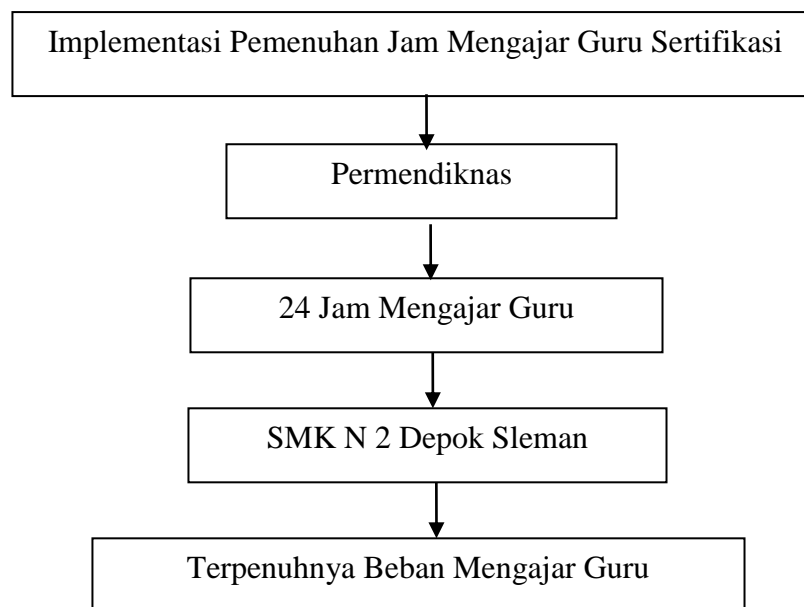
sedikit 6 jam tatap muka dalam satu minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru.

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan serta Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, peraturan-peraturan inilah yang dijadikan landasan bagi pemerintah, khususnya Kemdikbud RI dalam menentukan kebijakan-kebijakan lainnya.

Dengan sertifikasi seorang guru akan ditentukan layak atau tidaknya dalam menjalankan profesi keguruannya. Oleh karena salah satu tujuan sertifikasi adalah untuk kinerja guru, maka guru yang mendapatkan sertifikat pendidik adalah guru yang benar-benar memenuhi standar yang telah ditentukan. Apabila seorang guru telah sertifikasi tentu dia sudah dinyatakan layak untuk menjalankan tugas pokoknya, dengan kata lain guru yang sudah sertifikasi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan guru yang belum lulus sertifikasi.

Penelitian ini mengambil obyek penelitian, yaitu pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. Guru menjadi fokus penelitian mengenai bagaimana pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di sekolah tidak mampu memenuhi jam mengajar di sekolah tersebut dan memenuhi jam mengajar di sekolah lain. Guru sertifikasi dituntut setelah mendapatkan sertifikat pendidik setidaknya beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan

sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Dari uraian tersebut maka penulis menyusun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka berpikir

#### **E. Pertanyaan Penelitian**

Dari skema kerangka berfikir penelitian, peneliti selanjutnya merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
2. Apa sajakah jam tambahan mengajar guru sertifikasi di luar jam mengajar mata pelajaran khusus di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

3. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
4. Apa sajakah faktor penghambat untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
5. Apa sajakah solusi untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti mulai dari perumusan masalah sampai dengan penarikan kesimpulan (Muhammad Ali, 1985 : 81).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012: 1). Bodgan dan Taylor (Moleong, 2009: 4) menyebutkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, oleh karena itu, pendekatan ini diarahkan pada latar atau lingkungan sosial individu secara utuh.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan, menggambarkan serta menguraikan bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta. Harapan peneliti dapat menjelaskan fokus penelitian secara mendalam dan mudah untuk dipahami.

## **B. Setting Penelitian**

Pemilihan *setting* merupakan langkah awal dalam memasuki lapangan penelitian serta dalam pemilihan setting diharapkan mampu memfokuskan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta yang beralamatkan di Mrican Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 55281 telp (0274) 513515, fax (0274) 513438. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Maret - Juni 2016.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan (Suharsimi Arikunto, 2005 : 119). Subjek dalam penelitian ini meliputi Dinas pendidikan, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta dan Guru yang memenuhi jam mengajar di luar sekolah, hal ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan proses pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di sekolah lain.

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2011 : 38). Objek peneliti ini adalah implementasi kebijakan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. Penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pada subjek penelitian dan pengamatan peristiwa yang menggambarkan fokus penelitian .



Untuk lebih fokus dalam menggali data dalam penelitian ini dipilih sebagai narasumber utama adalah: Kepala Sekolah, dan guru. Dengan pertimbangan guru, kepala sekolah yang berkesempatan melaksanakan proses pemenuhan jam mengajar guru sebagai narasumber.

Keterangan dari narasumber utama dalam hal ini adalah guru digunakan sebagai referensi untuk wawancara selanjutnya dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Obyek penelitian ini adalah peran guru dalam pemenuhan jam mengajar di sekolah terutama untuk menggali informasi mengenai bentuk peran guru dalam memenuhi jam mengajar di sekolah asal maupun di sekolah lain.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan menunjukkan sesuatu yang abstrak sehingga tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda yang kasat mata, tetapi hanya dipertontonkan penggunaannya (Suharsimi Arikunto, 1993 : 151), selanjutnya dikemukakan bahwa metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengamatan/observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat berbagai informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Kegiatan observasi dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-

objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang dialami (Jonathan Sarwono, 2006: 224).

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ada di lingkungan SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta. Dalam proses observasi dilakukan pengamatan-pengamatan terhadap keadaan guru di sekolah yang memenuhi jam mengajar di sekolah dan memenuhi jam di luar sekolah serta jam tambahan khusus mengajar di luar jam mengajar mata pelajaran.

## 2. Wawancara

Burhan Bungin (2003: 108) mengatakan wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara merupakan alat pengumpulan data dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada informan atau sumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang banyak dan tepat secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara berulang-ulang terhadap para informan mengenai faktor pendukung serta kendala yang dihadapi guru dalam memenuhi jam mengajar di sekolah lain.

### 3. Kajian Dokumen

Kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari data-data sekunder yang berupa sumber-sumber tertulis dan foto-foto atau gambar. Metode kajian dokumen sangat diperlukan guna menambah objek temuan penelitian yang membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti dan juga guna untuk memperkuat hasil penelitian.

Kajian dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen tertulis untuk mendukung dan memperkuat hasil wawancara yang meliputi: data guru sertifikasi dalam pemenuhan beban mengajar.

## **E. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, manusia atau peneliti sendiri yang menjadi instrumen penelitian yang utama. Selain peneliti sebagai instrumen, dalam pengumpulan data peneliti juga dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, *tape recorder*, kamera, alat-alat tulis dan apa saja yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Moleong, 2002: 132-135).

#### 1. Pedoman Observasi

Laporan pengamatan dibuat dalam bentuk catatan lapangan. Penulisan catatan lapangan diurutkan secara kronologis saat peneliti melakukan penelitian di sekolah. Catatan lapangan menurut Moleong (2005: 181) merupakan alat yang umum digunakan oleh para pengamat

dalam situasi pengamatan tak berperanserta. Pengamatan yang dilakukan melihat bentuk partisipasi yang dilakukan guru dalam setiap tahap pemenuhan jam mengajar.

Table 1 Kisi-kisi pedoman oservasi:

No	Indikator
1.	Keadaan umum SMK Negeri 2 Depok Sleman
2.	Interaksi Kepala Sekolah, guru dan komite
3.	Pembagian jam mengajar guru
4.	Sarana Prasarana sekolah

Tabel 1. Kisi-Kisi Pedoman Observasi

## 2. Pedoman Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Narasumber diharapkan memberikan keterangan dan jawaban sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun. Kegiatan wawancara akan dibuat pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian. Pertanyaan yang tersusun dalam pedoman wawancara merupakan pertanyaan baku terstruktur. Poin-poin pertanyaan yang terdapat pada pedoman wawancara sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian.

Table 2 Kisi-kisi instrumen pedoman wawancara:

No.	Indikator
1.	Pengertian Sertifikasi guru di sekolah
2.	Tanggapan tentang pemenuhan jam mengajar guru
3.	Penerapan pemenuhan jam mengajar guru di sekolah
4.	Sikap guru dalam menyikapi pembagian jam mengajar di sekolah
5.	Implementasi pemenuhan jam mengajar di sekolah
6.	Faktor pendukung pemenuhan jam mengajar di sekolah
7.	Faktor penghambat pemenuhan jam mengajar di sekolah

Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen untuk mendapatkan data berupa profil sekolah. Moleong (2005:217) mengatakan dokumen dan *record* perlu digunakan karena merupakan sumber yang stabil. Penggunaan pedoman dokumentasi dibuat untuk mengklasifikasikan data yang akan didapat.

Table 3 Kisi-kisi pedoman dokumentasi penelitian:

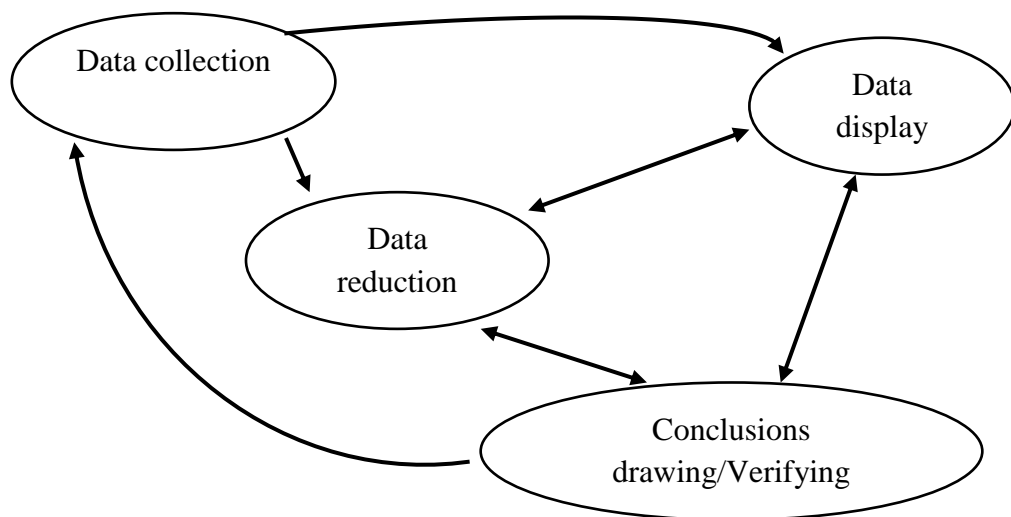
No	Aspek yang diamati	Indikator
1.	Profil sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah sekolah</li> <li>• Visi dan misi sekolah</li> <li>• Data guru</li> <li>• Data siswa</li> <li>• Data sarana dan prasarana</li> </ul>

Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Milles & Hubberman (Sugiyono, 2012: 91), yakni analisis data deskriptif kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu; *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification*).



### Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif

Aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Pengumpulan data selama penelitian di lapangan dicatat dan direkam, dalam bentuk deskriptif naratif, dengan menguraikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan berupa jam mengajar guru di sekolah serta tugas tambahan khusus di luar jam mengajar mata pelajaran.

#### **2. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data berarti merangkum, dan memilah-milah sesuai dengan kategori pertanyaan, memilih data yang dianggap penting dan menyisihkan data-data pelengkap. Reduksi data dilakukan terus-menerus selama penelitian dilaksanakan. Reduksi data juga merupakan analisis yang mendalam terhadap hasil dari pengumpulan data, mengarahkan, dan membuang data yang tidak berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah direduksi dapat mempermudah peneliti mencari data kembali jika diperlukan dikemudian hari.

#### **3. Penyajian Data (*Data Display*)**

Dalam tahap penyajian data, peneliti menyajikan data yang telah direduksi berdasarkan kategori data yang telah dikelompokkan sebelumnya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan foto cetak atau sejenisnya.

#### **4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing* /*Verifying*)**

Kegiatan verifikasi dilakukan sejak tahap pengumpulan data, reduksi data, sampai penyajian data. Proses verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan proses pemahaman mendalam atas penelitian yang dilakukan. Kesimpulan didasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam proses ini, peneliti harus berhati-hati dan teliti dalam mengambil kesimpulan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan.

#### **G. Keabsahan Data**

Dalam teknik validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data penelitian. Bogdan dan Taylor (dalam Sukardi 2006:106) mengatakan Triangulasi secara normal digunakan untuk melindungi peneliti dari bias melalui membandingkan data dari beberapa informasi yang berbeda. Bias dalam penelitian ini bisa terjadi apabila peneliti tidak melakukan pengecekan data dengan membandingkan dan mencari kesamaan data penelitian. Triangulasi juga disebut sebagai teknik pengerucutan data. Data yang dianggap penting dikerucutkan sampai mendapatkan data yang sesuai dan dapat dilihat keabsahannya. Teknik triangulasi merupakan cara untuk menghilangkan perbedaan yang mungkin terjadi dan menghilangkan keraguan peneliti dalam melakukan pembahasan.



Penelitian ini dapat dikatakan valid/sah apabila setiap data yang telah didapat dari penelitian menerapkan teknik pengabsahan triangulasi. Teknik triangulasi Moleong (2005:329) yang digunakan diantaranya seperti (1) triangulasi dengan sumber, (2) triangulasi metode dan (3) triangulasi teori.

1. Triangulasi sumber seperti yang dikatakan Moleong (2005:330) berarti “membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.” Triangulasi sumber dilakukan untuk mengecek apakah data yang didapat sesuai dengan pernyataan dari satu sumber dengan sumber yang lain. Cara yang dilakukan dapat berupa membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Selanjutnya membandingkan apa yang dikatakan guru dengan apa yang dikatakan oleh wakil kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Dapat juga membandingkan pengamatan dengan keterangan dari wawancara narasumber.

Dalam penelitian ini hasil dari pengamatan dan hasil wawancara digunakan untuk mengecek dan membandingkan apakah data yang didapat sesuai dengan pernyataan dari satu sumber dengan sumber yang lain.

2. Trianggualasi metode seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2005:331) dengan “melakukan pengecekan data dan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data.” Keabsahan data dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan dan membandingkan data hasil wawancara, data pengamatan serta data dari dokumen penelitian seperti foto dan notulensi rapat.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data serta penemuan hasil penelitian mengenai pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta. Dari data dan penemuan hasil disusun sampai menjadi suatu data yang teratur serta tersusun secara sistematis dan lebih rapi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi**

##### **1. Sejarah**

SMK N 2 Depok (STM Pembangunan) Yogyakarta. Semenjak diresmikannya sekolah dengan nama STM Pembangunan Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 1972, jenjang pendidikan adalah 4 tahun dengan fasilitas lengkap dan posisi tamatan apabila sudah bekerja di Industri adalah Teknisi Industri. Pada tanggal 7 Maret 1997 dengan Keputusan Mendikbud No. 036/O/1997 Nama Sekolah berubah menjadi SMK Negeri 2 Depok Yogyakarta.

SMK Negeri 2 Depok terletak di jalan STM Pembangunan No.1 Mrican, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. SMK Negeri ini merupakan salah satu dari delapan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia yang memiliki masa studi 4 tahun. Sekolah ini menempati areal terpadu seluas kurang lebih 4,5 hektar (untuk ruang teori, praktik/ bengkel/ laboratorium, masjid, auditorium, lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan basket, dan lain-lain).

##### **2. Profil Sekolah**

Nama Sekolah	: SMK Negeri 2 Depok
No. Statistik Sekolah (NSS)	: 721040214001
No. Statistik Sekolah (NSS)	: 20401315

Alamat : Mrican, Catur Tunggal, Depok,  
Sleman.

Telepon : (0274) 513515

Faksimili : (0274) 513438

### **3. Visi dan Misi**

Visi SMK Negeri 2 Depok yaitu “terwujudnya sekolah unggul penghasil sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur dan kompeten”.

Misi SMK Negeri 2 Depok yaitu:

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, kompeten, memiliki jiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan.
- b. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan Kurikulum yang dikembangkan di SMK Negeri 2 Depok.
- c. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- d. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler sebagai sarana mengembangkan bakat, minat, prestasi, dan budi pekerti peserta didik.
- e. Membangun dan mengembangkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta kerjasama dengan pihak-

pihak terkait (stakeholder) baik nasional maupun internasional.

- f. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang professional.

Tujuan Pendidikan dan Pelatihan SMK Negeri 2 Depok yaitu:

- a. Menyiapkan peserta didik/siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menyiapkan peserta didik/siswa untuk memasuki lapangan kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- c. Menyiapkan peserta didik/siswa agar mampu memilih karier, berkompetisi dan mengembangkan diri.
- d. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pada saat ini maupun yang akan datang.
- e. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif.

#### 4. Daftar Peserta Didik

Tabel 4. Jumlah Peserta Didik SMK Negeri 2 Depok Sleman.

NO	JURUSAN	TINGKAT				Jmlh
		I	II	III	IV	
1	T. Gambar Bangunan	64	59	61	60	244
2	T. Audio Vidio	32	31	29	33	125
3	T. Otomasi Industri	31	32	32	29	124
4	T. Komputer Jaringan	64	64	64	61	253
5	T. Permesinan	64	60	59	60	243
6	T. Bodi Otomotif	32	30	29	31	122
7	T. Kendaraan Ringan	32	31	30	32	125
8	Kimia Industri	32	32	32	32	128
9	Analisis Kimia	64	64	32	31	191
10	T. Geologi pertambangan	64	63	63	63	253
11	T. Peng. Migas dan Petrokimia	32	32	31	32	127
	jumlah total	511	498	462	464	1935

Tabel 4. Jumlah Peserta Didik SMK Negeri 2 Depok Sleman.

#### 5. Daftar Pendidik

##### a. Data jumlah Guru SMK Negeri 2 Depok Sleman

Tabel 5. Jumlah Guru SMK Negeri 2 Depok Sleman

NO	NAMA	PNS	GTT
1	Program Umum	42	22
2	Bimbingan Konseling	7	1
3	T. Gambar Bangunan	11	1
4	T. Elektro Audio Jaringan	6	0
5	T. Komputer Jaringan	8	4
6	T. Kimia Industri dan Analis	16	0
7	T. Otomasi Industri	5	0
8	T. Geologi Pertambangan	9	0
9	T. Perbaikan Bodi Otomotif	8	0
10	T. Permesinan	13	0
	Jumlah	125	28
	jumlah total	153	

Tabel 5. Jumlah Guru SMK Negeri 2 Depok Sleman

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman**

SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta merupakan sekolah kejuruan yang membutuhkan banyak tenaga pendidik guna menunjang proses belajar mengajar. Dalam prosesnya guru di sekolah mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi beban kerja minimal mereka bagi guru yang sudah tersertifikasi. Adapun salah satu indikator profesionalisme guru antara lain adalah guru tersebut mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Jumlah guru yang tidak merata juga telah mempersulit guru untuk memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka seminggu. Akibatnya para guru menjadi semakin sulit memenuhi jam wajib mengajar mereka minimal 24 jam tatap muka seminggu di sekolah. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Kualitas pendidikan yang semakin rendah akan diperparah dengan kewajiban beban kerja minimal 24 jam mengajar bila tidak terpenuhi.

Kebijakan sertifikasi merupakan salah satu peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. di SMK Negeri 2 Depok sendiri guru yang tidak memenuhi 24 jam tatap muka guru yang bersangkutan memenuhi

jam mengajar di sekolah lain. Dengan adanya sertifikasi ini guru diharapkan mampu memenuhi kriteria serta ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kualitas guru yang sudah sertifikasi. Seperti yang diungkapkan guru sertifikasi yakni UK :

“Selama saya memenuhi jam di sekolah ini dan sekolah lain, pemenuhan jam mengajarnya sudah berjalan dengan baik mas, 24 jam tatap muka yang menjadi syarat sertifikasi sudah terpenuhi”. (UK/2/5/2016)

Hal serupa juga diungkapkan AF, yakni:

“Begini mas,, kami selaku guru hanya memenuhi jam mengajar guru yang kurang memenuhi 24 jam mengajar. Di sekolah saya tidak memenuhi jam mengajar sesuai rombongan yang ada, jadi saya memenuhi jam mengajar di sekolah lain. Saya ikut ketentuan jadwal dan waktu di sekolah ini dan sekolah lain”. (AF/28/4/2016)

Hal serupa juga diungkapkan SH, yakni:

“Mencari di sekolah lain mas, di sekolah ini jam mengajar saya kurang”. (SH/9/5/2016)

Hal ini juga didukung oleh ungkapan JS, yakni:

“Pastinya harus memenuhi kekurangan jam mengajar mas, kalau gak tunjangan sertifikasi tidak turun. lhaa kalau di sekolah cukup saya tidak mencari jam mengajar lain di sekolah mas”. (JS/2/5/2016)

Dari ungkapan di atas menandakan bahwa guru sertifikasi 24 jam beban mengajar guru kurang, guru yang bersangkutan berusaha mencari jam tambahan di sekolah lain. Namun, di sekolah jumlah rombongan belajar serta daya tampung guru yang cukup guru sertifikasi tidak perlu mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain,



karena di sekolah beban mengajar 24 jam tatap muka sudah terpenuhi.

Seperti yang diungkapkan EA, yakni:

“Mencari tambahan di luar jam mengajar mata pelajaran kalau dimungkinkan di sekolah mas. Paling tidak seperti PP 74 tahun 2008 tentang pedoman dan jenis perhitungan beban mengajar guru di luar jam mengajar mata pelajaran khusus”. (EA/9/5/2016)

Hal ini serupa dengan ungkapan UK, yakni:

“Yang pasti mencari di sekolah lain mas, di sekolah ini jam tidak mencukupi mas..

Tapi ada jam tambahan di luar jam mengajar mata pelajaran mas, kalau menjadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga sudah ada 12 jam terpenuhi tinggal mencari tambahan kekurangan jam mengajar”. (UK/2/5/2016)

Dengan ungkapan di atas diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban Kerja Guru dan pengawasan Satuan Pendidikan pasal 1 disebutkan bahwa beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah. Namun demikian bagi guru yang mendapatkan tambahan tugas mendapatkan beban mengajar bisa kurang dari 24 jam tatap muka. Guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah satuan pendidikan beban mengajarnya paling sedikit 6 jam tatap muka atau membimbing paling sedikit 40 peserta didik bagi kepala satuan yang berasal dari guru BK. Adapun guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi

satuan pendidikan adalah paling sedikit beban mengajarnya 12 jam tatap muka.

Dengan demikian jumlah beban mengajar guru dapat terpenuhi dengan tugas ekuivalen bagi guru yang sudah sesuai dengan ketentuan. Beban mengajar guru yang di sekolah belum tercukupi guru mencari jam tambahan di luar sekolah, sehingga proses pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini juga dibenarkan dengan ungkapan UK, yakni:

“Selama saya menenuhi jam di sekolah ini dan sekolah lain pemenuhan jam mengajarnya sudah berjalan dengan baik mas, 24 jam tatap muka yang menjadi syarat sertifikasi sudah terpenuhi”. (UK/2/5/2016)

Hal serupa didukung ungkapan SY selaku Waka Kurikulum yang mengurus sertifikasi disekolah, yakni :

“Sudah mass.. di sekolah sudah terpenuhi dan berjalan sesuai jadwal dan keperluan sekolah. Tapi disetiap semester pasti ada perubahan jam mengajar dan perubahan rombel sekolah. Jadi disini guru dari sekolah lain yang memenuhi jam di sekolah tidak menjadi guru tetap sekolah, jadi tergantung kebutuhan tiap semester di sekolah. Kalau sekolah di semester berikutnya membutuhkan maka sekolah akan menerima pengajar dari sekolah lain”. (SY/12/5/2016)

## 2. Jam Tambahan Mengajar Guru Sertifikasi Di Luar Jam Mengajar Mata Pelajaran Khusus

Persyaratan mutlak untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik atau sering disebut tunjangan sertifikasi guru wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka setiap minggunya. Jika kurang 1 jam saja

maka guru bersertifikasi tidak akan mendapatkan tunjangan satu persenpun.

Tentu saja sebanyak 24 jam tatap muka ini sangat berharga bagi guru yang sudah tersertifikasi, namun jam tatap muka bisa juga didapat dari tugas tambahan guru seperti kepala perpustakaan, kepala bengkel, kepala laboratorium, pembina Osis dan yang diekuivalenkan dengan jam tatap muka. Walau sudah bisa diekuivalenkan masih banyak guru yang kekurangan jam mengajarnya disetiap minggunya. Seperti yang diungkapkan AF, yakni:

“Ada mas, tergantung dari pihak sekolah gimana, kalau ada kami siap melaksanakan jam tambahan di sekolah. Seperti yang dituangkan dalam PP 74 tahun 2008 pada pedoman perhitungan beban mengajar guru di luar jam mengajar mata pelajaran, ya contoh jadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mas. Itu paling tidak sudah 12 jam ekuivalen. Jam ekuivalensi ini berupa tambahan jam mengajar mata pelajaran khusus yang sudah di pertimbangkan mas”. (AF/28/4/2016)

Hal senada juga diungkapkan JS, yakni:

“Ada mas. Tapi itu semua tercantum dan sesuai ketentuan. Dalam PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2011. Semua aturan jam tambahan di luar mata pelajaran khusus sudah diatur dan dijelaskan”. (JS/2/5/2016)

Serta ungkapan SH, yakni:

“Sebagian guru ada mas, tapi saya tidak ada jam tambahan, saya mencari jam mengajar di sekolah lain, intinya semua sudah dalam permendiknas dan PP mas. Selain itu jam tambahan tidak dihitung”. (SH/9/5/2016)

Dari data di atas guru mendapatkan tambahan jam di luar mata pelajaran yang sudah diekuivalenkan, tetapi masih ada beberapa guru

yang belum terpenuhinya 24 jam tatap muka perminggunya. Hal serupa juga diungkapkan EA, yakni:

“Seperti yang dituangkan dalam pp 74 tahun 2008 dan permendiknas No. 3 tahun 2009 pada pedoman perhitungan beban mengajar guru di luar jam mengajar mata pelajaran. Perhitungan jam tersebut sudah ditentukan mas, selain didalam aturan tersebut tidak termasuk dalam hitungan, jadi perlu mencari tambahan di sekolah lain”. (EA/9/5/2016)

Dari ungkapan-ungkapan di atas didukung SY selaku Waka Kurikulum yang mengurus jam dan mengontrol proses sertifikasi yang ada di sekolah, yakni:

“Mencari jam keluar dari dari satuan pendidikan lain. Selain itu menjadi tugas tambahan yang sudah ditentukan. Seperti menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala perpustakaan dan lainnya yang sudah ditentukan di PP 74 tahun 2008. Selain itu dalam Permendiknas No. 30 tahun 2011 tentang aturan jam tambahan”. (SY/12/5/2016)

Khusus untuk ketentuan guru yang telah mengikuti kegiatan sertifikasi, jam minimal wajib mengajar adalah 24 jam tatap muka, kecuali yang mendapatkan tugas tambahan di atas yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 serta Permendiknas No. 30 tahun 2001. Disamping itu, pemenuhan wajib mengajar guru harus mata pelajaran sendiri (pemenuhan wajib mengajar tidak dibenarkan diambil dari mata pelajaran yang lain maupun serumpun). Ketentuan ini lebih longgar bagi guru yang belum bersertifikat, untuk pemenuhan jam wajib mengajar masih dibenarkan mengampu mata pelajaran lain.

Dari data di atas bahwa pemenuhan jam mengajar bisa dipenuhi dengan jam tambahan bagi guru yang diberi tugas khusus, selain itu

guru yang belum terpenuhi harus mencari di sekolah lain. Hal ini didukung ungkapan SS selaku pihak dinas yang menajadi operator guru sertifikasi, yakni:

“Dalam Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008, Permendiknas No. 30 tahun 2011 tentang pedoman perhitungan beban mengajar guru diluar jam mengajar mata pelajaran serta yang dituangkan dalam SKB 5 menteri mas. Jam tambahan selain mata pelajaran khusus yang sudah ditentukan. Jadi semua yang di luar itu sah diatur dan termasuk dalam hitungan jam mengajar.

Bagi guru yang tidak ada tugas khusus dan 24 jam tatap muka harus mengajar di sekolah lain”. (SS/18/5/2016)

### 3. Faktor Pendukung dalam Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

Kepribadian seorang guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena disinilah muncul tanggung jawab guru sekaligus menjadi kekuatan dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya pemerintah terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi.

Sebuah kebijakan diputuskan karena adanya suatu isu atau sebagai sebuah rumusan guna memecahkan masalah, dalam hal ini

adalah kebijakan sertifikasi guru. Kebijakan yang telah diputuskan harus segera direalisasikan dan dilaksanakan, karena sebuah program kelak harus mendapat evaluasi dari para penentu kebijakan. Dalam pemenuhan 24 beban mengajar guru di sekolah memerlukan dukungan yang kuat antara komponen satu dengan yang lain supaya dapat berjalan dengan baik. Sesuai yang diungkapkan JS, yakni:

“Jumlah rombongan belajar yang memadai dan daya tampung guru di sekolah memadai mas, jadi guru tidak memenuhi beban mengajar di luar sekolah”. (JS/2/5/2016)

Hal ini serupa dengan ungkapan EA, yakni:

“Jumlah rombongan belajar yang mencukupi dan daya tampung guru di sekolah yang diperbanyak mas..”.(EA/9/5/2016)

Hal ini senada dengan yang diungkapkan JS, yakni:

“Jumlah rombongan belajar yang memadai dan daya tampung guru di sekolah memadai mas, jadi guru tidak memenuhi beban mengajar di luar sekolah dan cukup terpenuhi”. (JS/2/5/2016)

Serta ungkapan AF, yakni:

“Komunikasi antar guru kepala sekolah dan pihak dinas, ya dari ketiga tersebut saya mendapatkan info dimana sekolah yang belum memenuhi jam/kekurangan jam mengajar. Jumlah rombongan belajar yang cukup serta meningkatkan daya tampung mengajar guru”. (AF/28/4/2016)

Hal ini dibenarkan oleh SY sebagai Waka Kurikulum Sekolah ,  
yakni:

“Jumlah rombongan belajar yang cukup serta meningkatkan daya tampung mengajar guru. Jadi guru cukup memenuhi di sekolah asal tidak perlu mencari jam tambahan di sekolah lain”. (SY/12/5/2016)

Selain dari jumlah rombongan belajar yang memadai serta daya tampung di sekolah juga memadai ada beberapa tugas tambahan khusus guru. Seperti yang Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 serta Permendiknas No. 30 tahun 2001 tentang tambahan jam khusus bagi guru yang ditugaskan. Hal serupa juga diungkapkan EA, yakni:

“Seperti yang dituangkan dalam pp 74 tahun 2008 dan permendiknas No. 3 tahun 2009 pada pedoman perhitungan beban mengajar guru di luar jam mengajar mata pelajaran. Perhitungan jam tersebut sudah ditentukan mas, selain di dalam aturan tersebut tidak termasuk dalam hitungan, jadi perlu mencari tambahan di sekolah lain”. (EA/9/5/2016)

Dari ungkapan-ungkapan di atas didukung SY selaku waka kurikulum yang mengurus dan mengontrol proses sertifikasi yang ada di sekolah, yakni:

“Mencari jam keluar dari dari satuan pendidikan lain. Selain itu menjadi tugas tambahan yang sudah ditentukan. Seperti menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala perpustakaan dan lainnya yang sudah ditentukan di PP 74 tahun 2008. Selain itu dalam Permendiknas No. 30 tahun 2011 tentang aturan jam tambahan”. (SY/12/5/2016)

Dari data diatas bahwa pemenuhan jam mengajar bisa dipenuhi dengan jam tambahan bagi guru yang diberi tugas khusus, selain itu guru yang belum terpenuhi harus mencari di sekolah lain. Hal ini didukung ungkapan SS selaku pihak dinas yang menjadi operator guru sertifikasi, yakni:

“Dalam Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008, Permendiknas No. 30 tahun 2011 tentang pedoman perhitungan beban mengajar guru diluar jam mengajar mata pelajaran serta yang dituangkan dalam SKB 5 Menteri mas. Jam tambahan selain mata pelajaran khusus yang sudah ditentukan. Jadi semua yang

di luar itu sah diatur dan termasuk dalam hitungan jam mengajar.

Bagi guru yang tidak ada tugas khusus dan 24 jam tatap muka harus mengajar di sekolah lain”. (SS/18/5/2016)

Dari data di atas bahwa 24 jam tatap muka guru dalam seminggu dapat terpenuhi dengan tugas khusus dan jam tambahan sesuai dengan pertimbangan perhitungan dalam Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008. Selain jam tambahan yang sudah ditentukan sekolah guru yang kekurangan jam mengajar di sekolah guru yang bersangkutan mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain dalam kawasan kemendikbud maupun di luar kemendikbud.

#### 4. Faktor Penghambat untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh sektor kehidupan, sebab kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat pendidikan. Peran sekolah dinilai sangat penting bagi maju dan berkembangnya masyarakat dan terjaminnya kebutuhan kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Sebagai upaya yang bukan saja membuahkan manfaat yang besar, pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sering dirasakan belum memenuhi harapan. Seperti halnya dalam pemenuhan beban mengajar guru sertifikasi harus terpenuhi guna



meningkatkan mutu pendidikan, namun guru dalam proses pemenuhan beban mengajar terdapat hambatan dalam proses pemenuhan. Seperti yang diungkapkan JS, yakni:

“Jumlah rombongan belajar dan peserta didik sedikit, jam pelajaran dalam kurikulum sedikit, waktu, tenaga dan pikiran terkuras karena jarak dengan sekolah lain”. (JS/2/5/2016)

Hal ini senada dengan ungkapan UK, yakni:

“Jam mengajar di sekolah pasti kurang dan harus mencari tambahan jam mengajar. Sama ini mas,, waktu dan lokasi. Tidak memungkinkan lagi kalau terjadi di daerah terpencil mas, bisa jadi jarak tempuh dari sekolah satu dengan yang lain memerlukan tenaga, waktu dan pikiran yang lebih”. (UK/2/5/2016)

Hal ini juga serupa dengan ungkapan SH selaku guru mata pelajaran khusus yang memenuhi jam mengajar di SMK Negeri 2 Depok Sleman, yakni:

“Tidak sepenuhnya jam mengajar saya terpenuhi di sekolah ini mas, perlu mondar mandir dari sekolah ini ke sekolah lain untuk melengkapi kekurangan jam mengajar saya. Jadi harus mencocokkan jam mengajar saya dan waktu mengajar di sekolah ini dengan sekolah lain mas”. (SH/9/5/2016)

Serta ungkapan AF, yakni:

“Kalau di sekolah guru tidak memenuhi syarat otomatis guru yang bersangkutan mencari di sekolah lain. Seperti halnya saya tidak hanya satu sekolah, tapi saya memenuhi di dua sekolah lagi, yaaa,, supaya 24 jam tatap muka dapat saya penuhi”. (AF/28/4/2016)

Dari data di atas mengungkapkan bahwa guru dalam memenuhi beban mengajar di sekolah maupun di luar sekolah menemui

hambatan. Hal ini dibenarkan oleh SY sebagai Waka Kurikulum Sekolah yang mengurus guru sertifikasi, yakni:

“Jarak, tenaga, waktu serta pikiran mas. Masalah tersebut sering terjadi di daerah terpencil dengan jarak satu sekolah dengan yang lain lumayan jauh mas. Beda halnya diperkotaan mas, masalah tersebut dapat diminimalisir”. (SY/12/5/2016)

Dengan terpenuhinya jam mengajar guru yang sesuai dengan jumlah guru serta daya tampung guru yang memadai, maka jam mengajar guru dapat terpenuhi, tapi, tidak sama dengan suatu kondisi sekolah yang berada di pedesaan, dimana kualitas pendidikan yang semakin rendah akan diperparah dengan kewajiban beban kerja mengajar 24 jam tatap muka per minggunya tidak dapat terpenuhi. Tentu ini akan membuat semangat kerja guru menjadi terganggu dan akan berusaha agar tunjangan sertifikasi dapat diraihinya.

Pemenuhan jam mengajar di daerah pedesaan atau terpencil memakan waktu, biaya, tenaga yang lebih guna memenuhi beban mengajar guru sertifikasi. Guru mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain, ini memerlukan jarak tempuh yang lebih. Tentu ini akan memperparah kondisi pendidikan di daerah. Seperti yang diungkapkan AF, yakni:

“Jarak mas, dari sekolah satu ke sekolah lain rata-rata memakan waktu karna jaraknya lumayan mas.hehe jadi waktu, tenaga serta pikiran terkuras karena jarak dengan satuan pendidikan yang lain jauh. Ya kedua jadwal di sekolah ini dan sekolah lain, jadi alokasi jam berbeda harus menyesuaikan, dampaknya pada jumlah kelas dan siswa”. (AF/28/4/2016)

Hal serupa juga diungkapkan EA, yakni:

“Jarak mass, dari sekolah satu ke sekolah lain rata-rata menekan waktu karna jaraknya. Karena dalam kondisi ini menyebabkan waktu, biaya, tenaga dan pikiran habis diperjalanan”. (EA/9/5/2016)

Serta ungkapan SH, yakni:

“Tidak sepenuhnya jam mengajar saya terpenuhi di sekolah ini mas, perlu mondar mandir dari sekolah ini kesekolah lain untuk melengkapi kekurangan jam mengajar saya. Jadi harus mencocokkan jam mengajar saya dan waktu mengajar di sekolah ini dengan sekolah lain mas”. (SH/9/5/2016)

Dari ungkapan-ungkapan di atas didukung SY sebagai pengurus sertifikasi di sekolah, yakni:

“Jarak, tenaga, waktu serta pikiran mas. Masalah tersebut sering terjadi di daerah terpencil dengan jarak satu sekolah dengan yang lain lumayan jauh mas. Beda halnya di perkotaan mas, masalah tersebut dapat diminimalisir”. (SY/12/5/2016)

Dari data di atas maka beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggunya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 dengan mengakomodir kesulitan-kesulitan yang diharapkan guru untuk memenuhi 24 jam tatap muka perminggu. Apalagi dengan semakin banyaknya guru yang lulus sertifikasi guru maka pembagian jumlah mata pelajaran kepada guru semakin sedikit dan 100% kelulusan guru yang telah tersertifikasi justru kewajiban 24 jam tatap muka per minggu tidak terpenuhi. Belum lagi faktor semakin bertambahnya jumlah guru akibat penerimaan CPNS dan adanya guru tidak tetap/honorar.

## 5. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

Guru yang telah lulus uji kompetensi sebagai guru profesional atau guru bersertifikat harus melaksanakan tugas mengajar minimal 24 tatap muka per minggunya. Beban mengajarguru yang sudah tersertifikat harus terpenuhi, jika tidak bisa memenuhi maka ada tugas tambahan yang lain. Dengan terpenuhinya jumlah jam mengajar guru tersertifikat maka tunjangan sertifikasi bisa diberikan.

Dalam pemenuhan 24 jam mengajar guru sertifikasi menemui kendala-kendala yang menghambat terpenuhnya jam mengajar guru. Rombongan belajar yang kurang memadai, daya tampung guru yang kurang serta jarak antara sekolah satu dengan yang lain yang berbeda. Hal tersebut pastinya memerlukan waktu, tenaga dan pikiran. Seperti yang diungkapkan JS, yakni:

“Jumlah rombel yang memadai dan daya tampung guru di sekolah memadai mas, jadi guru tidak memenuhi beban mengajar di luar sekolah”. (JS/2/5/2016)

Hal ini serupa dengan ungkapan EA, yakni:

“Jumlah rombongan belajar yang mencukupi dan daya tampung guru di sekolah yang diperbanyak mas..”.(EA/9/5/2016)

Hal ini senada dengan yang diungkapkan JS, yakni:

“Jumlah rombel yang memadai dan daya tampung guru di sekolah memadai mas, jadi guru tidak memenuhi beban mengajar diluar sekolah dan cukup terpenuhi”. (JS/2/5/2016)

Serta beberapa guru juga menemui kendala selain jumlah rombongan dan daya tampung guru kurang memadai. Hal ini sesuai ungkapan AF, yakni:

“Jarak mas, dari sekolah satu ke sekolah lain rata-rata memakan waktu karna jaraknya lumayan mas.hehe jadi waktu, tenaga serta pikiran terkuras karena jarak dengan satuan pendidikan yang lain jauh.

Ya kedua jadwal di sekolah ini dan sekolah lain, jadi alokasi jam berbeda harus menyesuaikan, dampaknya pada jumlah kelas dan siswa”. (AF/28/4/2016).

Hal ini juga serupa dengan ungkapan SY, yakni:

“Jarak, tenaga, waktu serta pikiran mas. Masalah tersebut sering terjadi di daerah terpencil dengan jarak satu sekolah dengan yang lain lumayan jauh mas. Beda halnya diperkotaan mas, masalah tersebut dapat diminimalisir”. (SY/12/5/2016)

Serta ungkapan SH, yakni:

“Tidak sepenuhnya jam mengajar saya terpenuhi di sekolah ini mas, perlu mondar mandir dari sekolah ini ke sekolah lain untuk melengkapi kekurangan jam mengajar saya. Jadi harus mencocokkan jam mengajar saya dan waktu mengajar di sekolah ini dengan sekolah lain mas”. (SH/9/5/2016)

Dari data di atas mengungkapkan bahwa dalam proses pemenuhan jam mengajar guru menemui kendala. Dari jumlah rombongan belajar yang kurang, daya tampung guru yang kurang mendukung serta jarak dari sekolah induk dengan sekolah lain bagi guru yang memenuhi jam di luar sekolah. Untuk mengatasi kendala tersebut maka pemerintah memberikan kelonggaran guna memenuhi jam mengajar. Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No 74

tahun 2008 serta Permendiknas No. 30 tahun 2001 tentang jam tambahan dan tugas khusus. Hal ini diperkuat oleh JS, yakni:

“Ada mas. Tapi itu semua tercantum dan sesuai ketentuan. Dalam PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2011. Semua aturan jam tambahan di luar mata pelajaran khusus sudah diatur dan dijelaskan”. (JS/2/5/2016)

Serta ungkapan SH, yakni:

“Sebagian guru ada mas, tapi saya tidak ada jam tambahan, saya mencari jam mengajar di sekolah lain, intinya semua sudah dalam permendiknas dan PP mas. Selain itu jam tambahan tidak dihitung”. (SH/9/5/2016)

Dari ungkapan-ungkapan di atas didukung SY selaku waka kurikulum yang mengurus dan mengontrol proses sertifikasi yang ada di sekolah, yakni:

“Mencari jam keluar dari dari satuan pendidikan lain. Selain itu menjadi tugas tambahan yang sudah ditentukan. Seperti menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala perpustakaan dan lainnya yang sudah ditentukan di PP 74 tahun 2008. Selain itu dalam Permendiknas No. 30 tahun 2011 tentang aturan jam tambahan”. (SY/12/5/2016)

Data di atas masih diperkuat ungkapan EA dalam memenuhi jam mengajar guru. Selain dari tugas tambahan khusus yang tertera PP 74 tahun 2008. Selain itu dalam Permendiknas No. 30 tahun 2011 masih ada solusi dengan penataan jumlah rombongan belajar serta memperbanyak daya tampung guru, yakni:

“Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dan meningkatkan daya tampung sekolah dengan bertambahnya jumlah peserta didik dan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu”. (EA/9/5/2016)

Hal serupa juga diungkapkan SH, yakni:

“Kalau solusi pengunya pasti guru tidak perlu mencari di sekolah lain, hanya mencukupi di sekolah ini saja cukup. Tapi bagi mata pelajaran khusus guru jam mengajar kurang dan harus mencari di sekolah lain. Dari pihak yang mengurus guru sudah dibagi di sekolah sekolah yang belum terpenuhi, ya seperti dipetakan langsung mass ke sekolah. Menambah jumlah rombongan belajar dan meningkatkan daya tampung mengajar guru di sekolah”. (SH/9/5/2016)

Satu-satunya solusi bagi guru yang tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggunya, maka jalan terbaiknya adalah dengan menambah jam mengajar bidang studi yang di sertifikasikan atau bidang studi yang disertifikasi, baik di sekolah induk maupun di sekolah lain yang memiliki izin operasional.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta. Implementasi kebijakan merupakan tahap dari sebuah proses kebijakan sebagai suatu putusan yang dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah. Seperti yang diungkapkan Arif Rohman (2009 : 133) implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan. Di SMK Negeri 2 Depok ini guru sertifikasi dituntut untuk memenuhi 24 jam tatap muka guna mendapatkan tunjangan sertifikasi. Menurut Martinis Yamin (2006 : 2) sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan

dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 11 sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.

Hingga saat ini tenaga kependidikan secara kuantitatif memiliki jumlah yang cukup banyak. Namun tidak semuanya memiliki kualitas tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi guru yang sudah ditetapkan yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, professional dan sosial. Selain itu selengkap apapun sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah namun apabila tenaga pendidiknya tidak memiliki kompetensi maka sarana prasarana tersebut tidak dapat membantu siswa dalam melakukan proses belajar, sebegus apapun kurikulum yang telah dicanangkan pemerintah namun jika tenaga pendidiknya tidak mengimplementasikan dengan baik maka itu tidak akan berdampak apa apa bagi siswa. Oleh karena itu selain terampil mengajar, guru juga wajib memiliki pengetahuan yang luas, meiliki sikap bijak dan dapat bersosialisasi dengan baik.

Sertifikasi diharapkan menjadikan guru sebagai pendidik profesional, yaitu berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidikan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidikan yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan



sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, guru berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok (Masnur Muslich, 2007 : 7).

Seperti halnya di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta sebagian guru terpaksa harus mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi beban kerja minimal mereka. Adapun salah satu indikator profesionalisme guru antara lain adalah guru tersebut mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Jumlah guru yang tidak merata juga telah mempersulit guru untuk memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka seminggu. Akibatnya para guru menjadi semakin sulit memenuhi jam wajib mengajar mereka minimal 24 jam tatap muka seminggu. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Kualitas pendidikan yang semakin rendah akan diperparah dengan kewajiban beban kerja minimal 24 jam mengajar bila tidak terpenuhi. Tentu ini akan membuat semangat kerja guru menjadi terganggu.

Guru memiliki empat aspek kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, personal dan profesional. Kompetensi pedagogik menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kompetensi yang harus dimiliki selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini

merupakan salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang baik pada diri sendiri, bersikap bijaksana serta arif, bersikap dewasa dan berwibawa serta mempunyai akhlak mulia untuk menjadi sauri teladan yang baik.

Surat keputusan bersama (SKB) 5 menteri yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama Nomor 05/X/Pb/2011, Nomor Spb/03/M.Pan-Rb/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/Pmk.01/2011, Dan Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. SKB ini disusun untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional (Sekjen Kemendikbud, 2011:4).

Perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu kepada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka (untuk SMA dan SMK) ke dinas pendidikan kabupaten/ kota (Sekjen Kemendikbud, 2011:11).

Menurut Menteri Kemendikbud, Mohammad Nuh (2009-2015) guru di Indonesia ini sejatinya mencukupi, tetapi gara-gara ada ketimpangan distribusi, maka ada sekolah di sekolah tertentu kekurangan guru. Bahkan, ada mata pelajaran tertentu di suatu sekolah kekurangan guru. Wakil

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim menjelaskan, SKB 5 menteri juga dibuat untuk menjawab keluhan dan permasalahan yang terkait distribusi guru. Sebab, di beberapa daerah seringkali ditemukan jumlah guru yang melebihi kebutuhan, sedangkan di daerah lainya justru kekurangan guru.

Namun SKB ini menimbulkan penolakan terutama dari guru. Guru resah karena ada tuntutan mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu (Silaban, 2012:1). Keresahan ini muncul karena dengan SKB lima menteri ini, beban mengajar guru benar-benar diberlakukan untuk tatap muka minimal 24 jam per minggu dan maksimal 40 jam per minggu. Padahal sebelum diberlakukan SKB ini, guru bersertifikat yang mengajar tatap mukanya kurang dari 24 jam per minggu masih dapat memenuhi dengan tugas-tugas tambahan di luar kelas seperti pembimbing ekstrakurikuler, wali kelas dan tutor paket A, B serta C (Kompas, 2012:1).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan mengamanatkan bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi, dan telah memenuhi beban kerja mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Tidak sedikit bagi yang kurang jam mengajar minimalnya kebingungan. Jalan keluarnya adalah kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada guru. Namun, bagi yang tidak bisa melakukan jam tambahan, maka guru harus mencari jam mengajar di sekolah lain pada jenjang yang sama dan masih satu rumpun mata pelajaran yang sama.

Bagi guru yang mata pelajarannya berkurang, pihak sekolah melakukan optimalisasi penataan dan pemerataan beban mengajar guru sehingga jam mengajar guru di sekolah dapat terpenuhi . Jika masih terdapat guru yang belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, pemenuhan jam mengajar guru dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan.

Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan diakui paling banyak 25% beban mengajar guru atau 6 jam tatap muka per minggu yang dibuktikan dengan bukti fisik. Bukti fisik ekuivalensi berupa fotokopi/salinan yang sudah dilegalisasi oleh kepala sekolah dan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten yang memiliki kewenangan.

Tugas guru yang diekuivalensi sudah terdapat kriteria ketentuan serta pembagian jam tambahan bagi guru yang tercantum dalam PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009. Selain kriteria dan ketentuan tersebut, maka jam di luar tidak dihitung dalam pemenuhan 24 jam minimal perminggu, sehingga jam tambahan khusus tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Beban kerja guru tersebut paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka perminggunya pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki ijin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam rangka pemenuhan beban kerja 24 jam tatap muka per minggu tersebut, ada 3 kemungkinan yang terjadi di satu satuan pendidikan, yakni:

- 1) Beban kerja terpenuhi, bilamana jumlah guru sesuai ratio rombongan belajar yang ada serta mata pelajaran yang diampunya.
- 2) Beban kerja melebihi ketentuan, bilamana jumlah guru lebih sedikit dari jumlah rombongan belajar yang tersedia, atau dengan kata lain di sekolah tersebut kekurangan guru.
- 3) Beban kerja kurang dari ketentuan, bilamana jumlah guru melebihi jumlah yang dibutuhkan.

Kalau yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama, maka sekolah tidak akan kesulitan dalam mengatur pembagian tugas mengajar guru. Kondisi inilah yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh semua pihak. Kemungkinan kedua biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil dimana sering terjadi kesulitan merekrut tenaga pengajar. Kemungkinan ketiga paling umum terjadi karena jumlah guru yang terus meningkat maupun penyebarannya yang belum merata sehingga guru kekurangan jam. Alternatif yang bisa diambil bagi guru yang kekurangan jam tersebut adalah mencari jam tambahan di sekolah lain bagi lingkup Kemdikbud maupun di luar Kemdikbud.

Pemenuhan jam mengajar guru yang sudah tersertifikasi wajib dipenuhi bagi guru yang sudah tersertifikasi, bila mana jam mengajar guru tersertifikasi tersebut tidak terpenuhi tunjangan profesi guru tidak keluar. Guru memenuhi jam mengajar selama 24 jam tatap muka perminggu dengan memenuhi di luar sekolah dan memenuhi jam mengajar dengan menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua perpustakaan dan lainnya yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 3 tahun 2009 pada pedoman perhitungan beban mengajar guru di luar jam mengajar mata pelajaran. Selain itu guru yang sudah sertifikasi yang kekurangan jam mengajar di sekolah asal guru yang bersangkutan mencari tambahan jam mengajar di luar sekolah.

Masalah yang muncul dari proses pemenuhan 24 jam tatap muka guru sertifikasi antara lain waktu, jarak, tenaga dan pikiran guru yang terkuras di perjalanan. Guru yang memenuhi di sekolah lain memerlukan biaya dan tenaga lebih untuk mencapai di sekolah lain. Hal tersebut masih bisa teratasi bila mana guru tersebut masih memenuhi jam mengajar di kota besar, tetapi masalah tersebut muncul bagi guru yang memenuhi jam mengajar di daerah pedesaan. Jarak dari satu sekolah dengan sekolah lain memerlukan jarak yang jauh serta tenaga yang lebih. Masalah tersebut dapat mengganggu kualitas dan kinerja guru tersertifikasi. Dengan adanya pemerataan guru yang tepat mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman

Guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman memenuhi 24 jam mengajar dengan mencari jam tambahan mengajar di sekolah lain. Selain pemenuhan jam mengajar di sekolah lain, guru yang mempunyai tugas tambahan khusus mendapatkan tambahan jam mengajar sesuai dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009.

2. Jam Tambahan Mengajar Guru Sertifikasi Di Luar Jam Mengajar Mata Pelajaran Khusus

Guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman dapat memenuhi 24 jam tatap muka dalam seminggu di luar jam tambahan mata pelajaran khusus. Selain pemenuhan jam mengajar di sekolah lain, guru yang mempunyai tugas tambahan khusus mendapatkan tambahan jam mengajar sesuai dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009. Selain dalam kriteria dan ketentuan jam tambahan khusus di sekolah maka guru yang kurang 24

jam tatap muka di sekolah mencari jam tambahan mengajar di sekolah lain bagi lingkup Kemendikbud maupun di luar Kemendikbud.

### 3. Faktor Pendukung dalam Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

Faktor pendukung adanya pemenuhan jam mengajar guru bersertifikasi yakni jumlah rombongan belajar yang mencukupi, jumlah guru di sekolah yang cukup serta guru mendapatkan tugas tambahan khusus di sekolah seperti menjadi kepala laboratorium dan kepala perpustakaan, selain itu tugas tambahan khusus guru sudah ada kriteria dan ketentuannya sesuai dengan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009. Selain tugas di atas guru yang jam mengajar kurang guru mencari jam tambahan mengajar di sekolah lain.

### 4. Faktor Penghambat untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

Faktor penghambat dalam pemenuhan 24 jam tatap muka guru yang sudah sertifikasi antara lain, jarak tempuh sekolah asal dengan sekolah lain memerlukan waktu, tenaga, biaya yang lebih guna memenuhi 24 jam tatap muka per minggunya. Akan tetapi bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan khusus tidak perlu mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain melainkan minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu dapat terpenuhi di sekolah. Jumlah guru di sekolah kurang serta jumlah rombongan belajar di sekolah sedikit



juga menjadi faktor penghambat guru dalam memenuhi 24 jam tatap muka dalam satu minggu.

5. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

Solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi di sekolah dengan meningkatkan jumlah guru di sekolah yang mencukupi sehingga guru mampu memenuhi jam mengajar hanya di satu sekolah, meningkatkan jumlah rombongan belajar perkelas sehingga jam mengajar guru menjadi lebih banyak serta jarak tempuh bagi guru yang memenuhi jam mengajar di sekolah satu dengan sekolah lain di perdekot, sehingga biaya, waktu serta pikiran guru tidak habis dalam perjalanan dari sekolah asal dengan sekolah lain.

## **B. Saran**

Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambil kebijakan, maka dari hasil kajian penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Guru**

Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru diharapkan lebih meningkatkan kualitas pendidik dengan adanya tunjangan bagi guru yang sudah tersertifikasi.

### **2. Bagi Sekolah**

- a. Meningkatkan daya tampung guru di sekolah
- b. Menambah jumlah rombongan belajar perkelas

### **3. Rekomendasi Kebijakan**

Diharapkan dengan adanya kebijakan sertifikasi guru mampu meningkatkan kualitas pendidik sehingga tujuan pendidikan dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suroyo. (2010). "Implikasi Kebijakan 24 Jam Mengajar terhadap Optimalisasi peran Guru PAI dalam Proses Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Arif Rohman & Teguh Wiyono. (2010). *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Burhan Bungin. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- E. Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosda karya.
- H.A.R Tilaar. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jonathan Sarwono. (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Martinis Yamin. (2006). *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Masnur Muslich. (2007). *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Ali, (1985). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Aksara.

- Novi Fitrianiingsih.(2011). “Studi Komparasi Kinerja Antara Guru Sertifikasi dan Guru Non Sertifikasi Dalam Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Pecangaan Jepara ”.*Skripsi* .Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- Solichin Abdul Wahab. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Cetakan Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Buku Ajar Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.
- Sugiyono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 31 tentang Hak Mendapatkan Pendidikan.
- William N. Dunn. (2010). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

## **LAMPIRAN 1**

# **Catatan Lapangan**

## Catatan Lapangan 1

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 Maret 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : Smk Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta  
Kegiatan : Observasi Pra Lapangan

### Deskripsi

Pada hari Kamis 3 Maret 2016 peneliti melakukan observasi lapangan yang bertempat di SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta. Sesampainya di lokasi, peneliti bertemu dengan satpam sekolah. Peneliti menanyakan kepada satpam guna melakukan izin penelitian. Setelah selesai dan diberi arahan peneliti disuruh ke resepsionis sekolah guna melakukan observasi serta permohonan surat izin penelitian. Peneliti bertanya kepada resepsionis mengenai syarat dan alur yang harus dipenuhi. Setelah selesai diberi arahan peneliti langsung minta izin observasi di lingkungan sekolah. Peneliti keliling lingkungan sekolah guna mengetahui lokasi dan kegiatan yang berlangsung disekitar sekolah. Setelah selesai keliling sekolah peneliti kembali ke resepsionis guna mohon pamit dan menyelesaikan syarat yang belum terpenuhi. Untuk peneliti disekolah syarat yang dibutuhkan surat izin dari fakultas. Karena peneliti belum membawa syarat tersebut peneliti izin untuk menyelesaikan proposal dan mengurus surat izin penelitian.

Sekiranya cukup, peneliti minta izin pamit pulang dan melengkapi persyaratan penelitian. Setelah selesai semua peneliti bergegas meninggalkan lokasi penelitian.

## Catatan Lapangan 2

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 Maret 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : Fakultas Ilmu Pendidikan  
Kegiatan : Mengurus surat ijin penelitian

### Deskripsi

Kamis 17 Maret 2016 peneliti datang ke subag pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan guna mengurus surat ijin penelitian. Peneliti langsung bertanya syarat juga keperluan guna mengurus surat ijin penelitian kepada petugas. Setelah selesai dengan syarat yang ditentukan peneliti menyerahkan satu bendel proposal. Peneliti disuruh mengisi data dikomputer disubag guna melengkapi syarat yang dibutuhkan. Setelah selesai petugas memberi tahu bahwa surat ijin tidak bisa jadi hari ini. Peneliti disuruh kembali besok untuk mengambil surat ijin penelitian dari fakultas ilmu pendidikan. Setelah selesai peneliti meninggalkan lokasi

### Catatan Lapangan 3

Hari : Jum'at  
Tanggal : 18 Maret 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : Fakultas Ilmu Pendidikan  
Kegiatan : Mengurus surat ijin penelitian

#### Deskripsi

Jum'at 18 Maret 2016 peneliti datang ke subag pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan guna mengambil surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Setelah surat jadi peneliti diarahkan untuk melengkapi serta diarahkan kemana peneliti harus mengurus surat penelitian. Setelah selesai petugas memberikan arahan dan syarat guna mengurus surat ijin peneliti bergegas meninggalkan lokasi.



#### Catatan Lapangan 4

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Maret 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : Kantor Kesbang Kabupaten Sleman  
Kegiatan : Mengurus surat ijin penelitian

#### Deskripsi

Rabu 23 Maret 2006 peneliti datang ke Kantor Kesbang kabupaten Sleman melanjutkan tembusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan untuk permohonan surat ijin penelitian. Peneliti sampai dilokasi langsung bertanya kepada petugas piket tentang prosedur juga syarat untuk permohonan surat ijin. Setelah selesai peneliti mengumpulkan syarat yang dibutuhkan Kantor Kesbang Kabupaten sleman guna memperoleh surat ijin penelitian. Syarat yang dibutuhkan surat ijin penelitian dari Fakultas, 1 bandel Proposal dan fotokopi KTP. Selesai mengumpulkan syarat peneliti menunggu surat yang dibuat. Beberapa saat kemudian peneliti dipanggil petugas untuk menerima surat tembusan untuk permohonan ijin penelitian ke Kantor Kabid. Sosial & Pemerintah Bappeda Kabupaten Sleman. Selesai dikantor kesbang kabupaten sleman peneliti pamit dan melanjutkan tembusan ke Kantor Kabid. Sosial & Pemerintah Bappeda Kabupaten Sleman.

Peneliti sampai di Kantor Kabid. Sosial & Pemerintah Bappeda Kabupaten Sleman langsung bertanya kepada petugas syarat yang diperlukan. Selesai mengumpulkan syarat permohonan peneliti disuruh menunggu pembuatan surat ijin penelitian. Beberapa waktu kemudian peneliti dipanggil untuk mengisi surat pernyataan untuk memberikan hasil penelitian untuk Kantor Kabid. Sosial & Pemerintah Bappeda Kabupaten

Sleman berupa CD (Skripsi/Tesis/Laporan) format PDF. Setelah selesai peneliti diberikan surat penelitian dan disuruh mengcopy surat tersebut guna untuk memenuhi tembusan. Surat yang dicopy selanjutnya distempel dan syarat yang diperlukan sudah terpenuhi. Setelah surat jadi peneliti pamit meninggalkan Kantor Kabid. Sosial & Pemerintah Bappeda Kabupaten Sleman.

## Catatan Lapangan 5

Hari : Senin  
Tanggal : 28 Maret 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : -  
Kegiatan : Mengantarkan surat tembusan

### Deskripsi

Senin 28 Maret 2016 peneliti mengantarkan surat tembusan dari Kabid. Sosial & Pemerintah Bappeda Kabupaten Sleman ke kantor Bupati Sleman. Peneliti langsung bertanya kepada resepsionis, selesai peneliti diarahkan kepada Sub Umum untuk mengantarkan surat tembusan. Surat tembusan dari Kabid. Sosial & Pemerintah Bappeda Kabupaten Sleman telah diterima pihak Bupati Sleman sebagai laporan. Setelah selesai peneliti meninggalkan lokasi.

Selesai dari kantor Bupati Sleman peneliti melanjutkan ke Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Sleman. Peneliti disambut satpam dan diarahkan ke Sub Bagian Umum untuk menyerahkan kepada Sub Bagian Umum surat tembusan penelitian. Setelah selesai peneliti pamit dan meninggalkan lokasi.

Peneliti melanjutkan mengantarkan surat tembusan ke Kantor Camat Depok. Surat diserahkan ke resepsionis. Setelah selesai peneliti pamit dan meninggalkan lokasi. Kemudian peneliti melanjutkan mengantar surat tembusan untuk Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok. Setelah selesai peneliti pamit dan meninggalkan lokasi.

Selesai mengantar tembusan peneliti langsung kekampus untuk mengantarkan tembusan untuk Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Setelah mengantarkan surat peneliti meninggalkan kantor Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.

## Catatan Lapangan 6

Hari : Selasa  
Tanggal : 5 April 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Kegiatan : Mengantarkan surat ijin penelitian

### Deskripsi

Selasa tanggal 5 April 2016 peneliti melanjutkan mengantarkan surat ijin penelitian yang telah selesai untuk sekolah. Peneliti datang kesekolah dan disambut dengan satpam dan diarahkan ke bagian resepsionis sekolah. Peneliti disuruh mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam melaksanakan berupa satu bendel proposal dan surat ijin penelitian. Setelah selesai mengurus surat penelitian peneliti disuruh menunggu untuk bertemu dengan bagian kurikulum sekolah yang menangani guru yang memenuhi jam mengajar disekolah lain.

Peneliti bertemu langsung dengan pihak kurikulum SMK Negeri 2 Depok dan peneliti konsultasi dan mencari data jumlah guru disekolah. Peneliti menanyakan jumlah guru dan kondisi guru yang ada disekolah. Setelah beberapa hal mengenai informasi guru dan pemenuhan jam mengajar guru disekolah cukup peneliti bergegas pamit dan meninggalkan lokasi penelitian.

## Catatan Lapangan 7

Hari : Senin  
Tanggal : 11 April 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Kegiatan : Pengumpulan data Guru disekolah

Peneliti kembali kesekolah guna melengkapi data-data guru dan siswayang kurang lengkap. Peneliti kembali bertemu denga bagisn kurikulum guns melengkapi data guru dan siswa di sekolah. Peneliti disarankan untuk mengcopy data jumlah guru dan siswa yang ada disekolah. Peneliti mendapatkan data jumlah guru yang memenuhi jam mengajar disekolah ini dan beberapa data guru yang memenuhi jam mengajar disekolah ini dari sekolah lain. Ada beberapa guru dari sekolah lain yang juga memenuhi jam mengajar disekolah ini karena jam mengajar guru disekolah tersebut kurang memenuhi 24 jam tatap muka. Sehingga guru dari sekolah lain memenuhi jam mengajar di SMK Negeri Depok. Setelah selesai mencari informasi dan data siswa dan guru yang ada disekolah, peneliti bergegas pamit dan meninggalkan lokasi penelitian.

## Catatan Lapangan 8

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 April 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Kegiatan : Melengkapi data jumlah Guru

Peneliti kembali kesekolah guna melengkapi data jumlah guru yang memenuhi jam mengajar disekolah lain dan guru yang memenuhi jam mengajar disekolah ini. Disini peneliti diarahkan kembali kebagian kurikulum guna melengkapi data yang kurang mengenai jumlah guru yang memenuhi jam mengajar. Peneliti kembali melengkapi dan konsultasi dan bagaimana kelanjutan penelitian selanjutnya. Menegenai prosedur wawancara penelitian kepada kepala sekolah dan guru yang memenuhi jam mengajar guru disekolah. Setelah selesai memenuhi data guru peneliti disuruh kembali kesekolah minggu depan guna menemui pihak kurikulum lagi. Peneliti mengikuti saran yang diberikan pihak sekolah untuk kembali dihari lain karena guru yang bersangkutan ada rapat sekolah. Setelah selesai urusan dengan pihak kurikulum peneliti bergegas pamit dan meninggalkan sekolah.

## Catatan Lapangan 9

Hari : Senin  
Tanggal : 25 April 2016  
Waktu : 09.00 WIB- Selesai  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Kegiatan : Melengkapi data jumlah Guru dan Profil Sekolah

### Deskripsi

Peneliti kembali kesekolah guna melengkapi data jumlah guru serta profil sekolah. Peneliti kembali bertemu pihak sekolah guna melengkapi data guru yang memenuhi jam mengajar disekolah ini dan disekolah lain. Setelah cukup peneliti diarahkan ke resepsionis sekolah guna melengkapi data guru untuk koordinasi saat wawancara dengan kepala sekolah guru berupa nomer telpon untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Karena guru yang bersangkutan tidak selalu ada disekolah karena guru yang bersangkutan memenuhi jam mengajar disekolah lain. Data informasi guru telah selesai diperoleh peneliti bergegas meminta bantuan untuk melengkapi data profil sekolah. Peneliti mencari info dan data dokumentasi mengenai sekolah berupa kondisi lingkungan sekolah, guru, siswa serta kegiatan disekolah ini. Setelah selesai dan cukup data yang diperoleh peneliti bergegas pamit dan meninggalkan sekolah.

## Catatan Lapangan 10

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 April 2016  
Waktu : 08.30 WIB- Selesai  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Kegiatan : Wawancara

### Deskripsi

Pada tanggal 28 April 2016 peneliti datang ke SMK Negeri 2 Depok Sleman guna melaksanakan wawancara dengan waka kurikulum dan guru setempat. Sesampainya di sekolah peneliti menuju resepsionis guna menanyakan keberadaan Bapak Waka Kurikulum. Peneliti disuruh menunggu karena yang bersangkutan baru keluar dan untuk menunggu. Di sela-sela waktu menunggu peneliti wawancara dengan guru yang kebetulan berada disekolah yang memenuhi jam mengajar disekolah dari sekolah lain. Peneliti melakukan wawancara dengan guru diruang tunggu sekolah. Selesai wawan cara dengan guru yang memenuhi jam mengajar disekolah selesai peneliti menunggu kedatangan Bapak Waka Kurikulum.

Pada jam 11 siang yang bersangkutan datang kesekolah, peneliti disuruh menunggu sebentar untuk melakukan wawancara. Setelah selesai istirahat peneliti disuruh masuk ke ruang Waka Kurikulum guna wawancara. Sesampainya didalam peneliti wawancara dengan waka kurikulum. Setelah selesai dan cukup wawancara peneliti meminta ijin pamit pulang dan terimakasih.



## Catatan Lapangan 11

Hari : Senin  
Tanggal : 2 Mei 2016  
Waktu : 08.30 WIB- Selesai  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Kegiatan : Wawancara

### Deskripsi

Pada tanggal 2 Mei 2016 peneliti datang ke SMK Negeri 2 Depok Sleman guna melaksanakan wawancara dengan guru setempat. Sesampainya di sekolah peneliti menuju resepsionis guna menanyakan keberadaan guru yang bersangkutan guna wawancara. Peneliti disuruh menunggu guru yang bersangkutan karena guru belum selesai mengajar. Setelah selesai mengajar peneliti bertemu dengan guru yang bersangkutan guna melakukan wawancara. Kemudian peneliti menuju keruang guru untuk melakukan wawancara dengan guru tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara peneliti bergegas pamit dan terimakasih. Pada waktu yang bersamaan peneliti melakukan wawancara dengan dua guru, setelah selesai proses wawancara peneliti ijin pamit untuk pulang dan terimakasih.

## Catatan Lapangan 12

Hari : Senin  
Tanggal : 9 Mei 2016  
Waktu : 08.30 WIB- Selesai  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Kegiatan : Wawancara

### Deskripsi

Pada tanggal 2 Mei 2016 peneliti datang ke SMK Negeri 2 Depok Sleman guna melaksanakan wawancara dengan guru setempat. Sesampainya di sekolah peneliti menuju resepsionis guna menanyakan keberadaan guru yang bersangkutan guna wawancara. Peneliti menunggu guru yang bersangkutan karena guru belum selesai mengajar. Setelah selesai mengajar peneliti bertemu dengan guru yang bersangkutan guna melakukan wawancara. Kemudian peneliti menuju keruang guru untuk melakukan wawancara dengan guru tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara peneliti bergegas pamit dan terimakasih.

Pada hari yang bersamaan peneliti melaksanakan wawancara dengan guru di SMN Negeri 2 Depok yang memenuhi jam mengajar disekolah lain serta dengan guru dari sekolah lain yang memenuhi jam mengajar di SMK Negeri 2 Depok sleman. Setelah kedua guru selesai wawancara selesai, peneliti kangsung pamit ijin pulang dan terimakasih.

### Catatan Lapangan 13

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Mei 2016  
Waktu : 08.30 WIB- Selesai  
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Sleman  
Kegiatan : Wawancara

#### Deskripsi

Pada tanggal 18 Mei 2016 peneliti datang ke Dinas Pendidikan Kota Sleman guna melaksanakan wawancara dengan pihak dinas pendidikan. Sesampainya di dinas peneliti menuju resepsionis guna menanyakan keberadaan pengurus bagian kepegawaian yang bersangkutan guna wawancara. Peneliti menunggu yang bersangkutan karena petugas baru melayani guru yang melakukan mutasi kesekolah lain. Setelah selesai urusan dengan guru peneliti melakukan wawancara dengan petugas yang bersangkutan. Peneliti menanyakan bagaimana proses dan alur yang ada dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. Setelah selesai wawancara peneliti bergegas pamit dan meninggalkan lokasi wawancara.

## Catatan Lapangan 14

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Juni 2016  
Waktu : 08.30 WIB- Selesai  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Kegiatan : Mengurus Surat Ijin Penelitian

### Deskripsi

Pada tanggal 20 juni 2016, peneliti menuju lokasi di Smk Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta guna mengurus surat ijin telah melakukan penititan. Peneliti langsung menuju bagian surat-menyurat, berkas dan syarat yang diperlukan dipenuhi peneliti disuruh menunggu dibuatkan surat. Peneliti menunggu diruang tunggu sekolah, setelah selesai surat dicetak peneliti disuruh menemui petugas yang bersangkutan. Petugas menyerahkan surat yang sudah jadi. Setelah urusan dan keperluan selesai peneliti bergegas pamit dan kembali pulang.

## LAMPIRAN 1

### **Pedoman Observasi, Dokumentasi dan Wawancara**

## **PEDOMAN OBSERVASI**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

Dalam pengamatan ( Observasi ) yang telah dilakukan observasi mengenai Implementasi Kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi Di Smk Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta, ialah:

Mengamati kondisi lokasi penelitian yang akan diteliti.

1. Letak geografis
2. Keadaan wilayah

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU**  
**SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

Pada pedoman dokumentasi ini melalui arsip tertulis:

1. Kriteria guru sertifikasi di Smk Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta
2. Kondisi pemenuhan jam mengajar guru di Smk Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

1. Bagaimana Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
3. Apa saja yang dilakukan Bapak/ibu dalam menganti pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
4. Apakah ada jam tambahan mengajar disekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
5. Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
6. Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?
7. Bagaimana respon guru terhadap penerapakan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
8. Apakah manfaaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?
9. Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?
11. Apa saja solusi dari bapak dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?



### LAMPIRAN 3

## **Transkrip Wawancara**

**Transkrip Wawancara Guru dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta**

Hari/Tanggal : Kamis 28 April 2016

Waktu : 09.00

Tempat : SMK Negeri 2 Depok Sleman

Narasumber : Drs. Ahwan Fathoni, M.Pd

Tema : Implementasi kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok

1. Bagaimana Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Begini mass,, kami selaku guru hanya memenuhi jam mengajar guru yang kurang memenuhi 24 jam mengajar. Disekolah saya tidak memenuhi jam mengajar sesuai rombel yang ada, jadi saya memenuhi jam mengajar di sekolah lain. Saya ikut ketentuan jadwal dan waktu disekolah ini dan sekolah lain.**

2. Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**hehe, ya saya berperan langsung mas, wong saya yang memenuhi jam mengajar kog. Saya terlibat langsung dalam proses dan pelaksanaannya.**

3. Apa saja yang dilakukan Bapak/ibu dalam mengganti pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Kalau sekolah mampu memenuhi rombel dan daya tampung guru otomatis saya cukup mengajar di sekolah ini mas, kalau jumlah rombel kurang ada beberapa guru mencari jam tambahan supaya jam mengajar 24 tatap muka terpenuhi.**

4. Apakah ada jam tambahan mengajar di sekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Ada mas, tergantung dari pihak sekolah gimana, kalau ada kami siap melaksanakan jam tambahan disekolah. Seperti yang dituangkan dalam PP 74 tahun 2008 pada pedoman perhitungan beban mengajar guru diluar jam mengajar mata pelajaran, ya contoh jadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mas. Itu paling tidak asudah 12 jam**

**ekuivalen. Jam ekuivalensi ini berupa tambahan jam mengajar mata pelajaran khusus yang sudah di pertimbangkan mas.**

5. Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Kalau di sekolah guru tidak memenuhi syarat otomatis guru yang bersangkutan mencari disekolah lain. Seperti halnya saya tidak hanya satu sekolah, tapi saya memenuhi di dua sekolah lagi, yaaa,, supaya 24 jam tatap muka dapat saya penuhi.**

6. Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?

**Sudah mass.. di sekolah sudah terpenuhi dan berjalan sesuai jadwal dan keperluan sekolah. Tapi disetiap semester pasti ada perubahan jam mengajar dan perubahan rombel sekolah. Jadi disini saya tidak menjadi guru tetap, bisa tengah semester berikutnya rombel disekolah terpenuhi, jadi terpaksa saya mencari sekolah lain**

7. Bagaimana respon guru terhadap penerapakan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Baik massss,, ya karna itu sudah menjadi syarat sertifikasi**

8. Apakah manfaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?

**Yaaa pastinya jumlah/syarat 24 jam tatap muka saya terpenuhi dan membantu sekolah dalam memenuhi jumlah rombel yang kurang.**

9. Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Komunikasi antar guru kepala sekolah dan pihak dinas, ya dari ketiga tersebut saya menapatkan info dimana sekolah yang belum memenuhi jam/ kekurangan jam mengajar. Jumlah rombongan belajar yang cukup serta meningkatkan daya tampung mengajar guru.**

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jarak mass, dari sekolah satu ke sekolah lain rata-rata memakan waktu karna jaraknya lumayan mas.hehe jadi waktu, tenaga serta pikiran terkuras karena jarak dengan satuan pendidikan yang lain jauh.**

**Ya kedua jadwal disekolah ini dan sekolah lain, jadi alokasi jam berbeda harus menyesuaikan, dampaknya pada jumlah kelas dan siswa.**

11. Apa saja solusi dari bapak dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Dari pihak dinas langsung memetakan langsung kemana arah guru yang kurang jam mengajar ke sekolah yang dibutuhkan. he jadi guru tidak kesulitan dalam mencari kekurangan jam mengajar. hee Serta memperdekatkan jarak satuan pendidikan yang lain dalam pemenuhan beban mengajar.**

**Transkrip Wawancara Guru dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta**

Hari/Tanggal : Senin 2 Mei 2016

Waktu : 09.00

Tempat : SMK N 2 Depok Sleman

Narasumber : Joko Suyono, S. Th.

Tema : Implementasi kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok

1. Bagaimana Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Gimana ya masss. Ya pastinya penerapan di sekolah ini sudah sesuai, saya tinggal mengikuti jadwal mengajar disini kog mass**

2. Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Terlibat didalamnya mas.**

3. Apa saja yang dilakukan Bapak/ibu dalam mengganti pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Pastinya harus memenuhi kekurangan jam mngajar mas, kalau gak tunjangan sertifikasi tidak turun.**

**Lhaa kalau di sekolah cukup saya tidak mencari jam mengajar lain disekolah mas.**

4. Apakah ada jam tambahan mengajar di sekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Ada mas. Tapi itu semua tercantum dan sesuai ketentuan. Dalam PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2011. Semua aturan jam tambahan di luar mata pelajaran khusus sudah diatur dan dijelaskan.**

5. Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Saya maupun guru yang belum memenuhi pastinya akan mencari tambahan jam mengajar supaya terpenuhi, dengan tambahan jam selain mata pelajaran berupa tambahan tugas sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium,**

**kepala jurusan dan kepala bengkel mas. Itu termasuk dalam pemenuhan jam diluar jam mata pelajaran.**

6. Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?

**Sudahh maaass,,,**

7. Bagaimana respon guru terhadap penerapan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Sudah baguss, sudah berjalan sesuai yang diinginkan antara jadwal dan kekurangan rombel semuanya terpenuhi.**

8. Apakah manfaaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?

**Banyak mass. Salah satune kekurangan jam mengajarku terpenuhi, ya karna di sekolahku dulu jam mngajar kurang kog mass..**

9. Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jumlah rombel yang memadai dan daya tampung guru di sekolah memadai mas, jadi guru tidak memenuhi beban mengajar diluar sekolah dan cukup terpenuhi**

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jumlah rombongan belajar dan peserta didik sedikit, jam pelajaran dalam kurikulum sedikit, waktu, tenaga dan pikiran terkuras karena jarak dengan sekolah lain**

11. Apa saja solusi dari bapak dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Menambah jumlah rombongan belajar dan meningkat kan daya tampung mengajar guru disatuan pendidikan mass**

**Transkrip Wawancara Guru dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta**

Hari/Tanggal : Senin 2 Mei 2016

Waktu : 11.00

Tempat : SMK N 2 Depok Sleman

Narasumber : Dra. Uswatun Khasanah

Tema : Implementasi kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok

1. Bagaimana Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Selama saya menenuhi jam di sekolah ini dan sekolah lain pemenuhan jam mengajarnya sudah berjalan dengan baik mas, 24 jam tatap muka yang menjadi syarat sertifikasi sudah terpenuhi**
2. Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Saya sebagai pelaku hanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan mas, dari mulai syarat yang harus dipenuhi dan diterapkan. Jadi saya terlibat langsung dalam prosesnya, dari pencarian sekolah ya sampai terjun langsung mengajar disekolah ini dan sekolah lain.**
3. Apa saja yang dilakukan Bapak/ibu dalam mengganti pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Yang pasti mencari disekolah lain mas, di sekolah ini jam tidak mencukupi mas..**  
**Tapi ada jam tambahan diluar jam mengajar mata pelajaran mas, kalau menjadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga sudah ada 12 jam terpenuhi tinggal mencari tambahan kekurangan jam mengajar.**
4. Apakah ada jam tambahan mengajar di sekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Ada mas, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi kebanyakan yang dilakukan guru mencari jam di luar sekolah.**
5. Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Yaa seperti tadi mas, bagaimana saya maupun guru yang bersangkutan mencari tambahan jam mengajar di sekolah, kalau sudah memungkinkan terpenuhi tidak harus mencari diluar sekolah. Tapi ya tidak tergantung kemungkinan di sekolah terpenuhi, yang sudah ada mencari jam disekolah lain.**

6. Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?

**Sudah masss...**

7. Bagaimana respon guru terhadap penerapan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Kalau saya pribadi ya sudah sangat baik. Yaa karna jumlah jam mengajar saya sudah terpenuhi.**

8. Apakah manfaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?

**Pastinya jam mengajar terpenuhi, banyak teman guru mass. Tapi jam mengajar tergantung sama kebutuhan yang ada disekolah mas**

9. Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Apa ya mass... informasi yang jelas mas antara sekolah satu dengan yang lain. Memetakan langsung atau membagi guru berdasarkan dengan pertimbangan jarak dan biaya. Masalah yang terjadi biasanya didaerah terpencil mas, jarak satu dengan yang lain tidak memungkinkan. Jadi memakan waktu, tenaga yang ekstra lebih.**

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jam mengajar di sekolah pasti kurang dan harus mencari tambahan jam mengajar. Sama ini mass,, waktu dan lokasi. Tidak memungkinkan lagi kalau terjadi didaerah terpencil mas, bisa jadi jarak tempuh dari sekolah satu dengan yang lain memerlukan tenaga, waktu dan pikiran yang lebih**

11. Apa saja solusi dari bapak dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Menambah jumlah daya tampung sekolah serta tambahan jam Ekuivalensi kegiatan mass, itu sudah cukup membantu pemenuhan jam mengajar**



**Transkrip Wawancara Guru dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta**

Hari/Tanggal : Senin 9 Mei 2016

Waktu : 09.00

Tempat : SMK N 2 Depok Sleman

Narasumber : Drs. Suharso, MPSA

Tema : Implementasi kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok

1. Bagaimana Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Kog begitu mass, pasti jam mengajar saya sudah terpenuhi**
2. Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Intinya begini mass saya sebagai pelaku pastinya saya terlibat langsung didalamnya.**
3. Apa saja yang dilakukan Bapak/ibu dalam mengganti pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Mencari di sekolah lain mas, disekolah ini jam mengajar saya kurang.**
4. Apakah ada jam tambahan mengajar disekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Sebagian guru ada mas, tapi saya tidak ada jam tambahan, saya mencari jam mengajar di sekolah lain, intinya semua sudah dalam permendiknas dan PP mas. Selain itu jam tambahan tidak dihitung**
5. Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Mencari tambahan di sekolah kalau tidak pastinya mencari kekurangan di sekolah lain mass..**
6. Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?  
**Sudah mass, sudah sesuai dan berjalan dengan baik**
7. Bagaimana respon guru terhadap penerapan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Sangat baik mas,.**

8. Apakah manfaaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?

**Pertama jam mengajar saya terpenuhi. Kedua banyak kenalan guru di sekolah lain dan ya pasti tunjangan dari sertifikasi jadi turun mas.heehe**

9. Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Informasi yang jelas mas antara sekolah satu dengan yang lain. Data guru serta sekolah yang lengkap.**

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Tidak sepenuhnya jam mengajar saya terpenuhi di sekolah ini mas, perlu mondar mandir dari sekolah ini kesekolah lain untuk melengkapi kekurangan jam mengajar saya. Jadi harus mencocokkan jam mengajar saya dan waktu mengajar di sekolah ini dengan sekolah lain mas.**

11. Apa saja solusi dari bapak dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Kalau solusi penganya pasti guru tidak perlu mencari di sekolah lain, hanya mencukupi di sekolah ini saja cukup. Tapi bagi mata pelajaran khusus guru jam mengajar kurang dan harus mencari di sekolah lain. Dari pihak yang mengurus guru sudah dibagi di sekolah sekolah yang belum terpenuhi, ya seperti di petakan langsung mass ke sekolah. Menambah jumlah rombongan belajar dan meningkatkan daya tampung mengajar guru disekolah**

## **Transkrip Wawancara Guru dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta**

Hari/Tanggal : Senin 9 Mei 2016  
Waktu : 09.00  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Narasumber : Erma Ade Susmonowati, S.Pd.  
Tema : Implementasi kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok

1. Bagaimana Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Sebagai pelaku tinggal melakukan tahapan serta proses yang ada mas, kalau disekolah tinggal menyesuaikan jadwal tiap kelas maupun rombongan belajar.**
2. Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Pasti terlibat mas, karena saya termasuk didalamnya**
3. Apa saja yang dilakukan Bapak/ibu dalam menganti pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Mencari tambahan diluar jam mengajar mata pelajaran kalau dimungkinkan di sekolah mas. Paling tidak seperti PP 74 tahun 2008 tentang pedoman dan jenis perhitungan beban mengajar guru diluar jam mengajar mata pelajaran khusus.**
4. Apakah ada jam tambahan mengajar di sekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Seperti yang dituangkan dalam pp 74 tahun 2008 dan permendiknas No. 3 tahun 2009 pada pedoman perhitungan beban mengajar guru diluar jam mengajar mata pelajaran. Perhitungan jam tersebut sudah ditentukan mas, selain didalam aturan tersebut tidak termasuk dalam hitungan, jadi perlu mencari tambahan di sekolah lain**
5. Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Mencari jam keluar dari dari satuan pendidikan lain. Kalau tidak melakukan pembinaan ekstrakurikuler, melakukan remedial**

**karena kegiatan tersebut dapat mengurangi beban jam mengajar guru**

6. Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?

**Sudah mass.. di sekolah sudah terpenuhi dan berjalan sesuai jadwal dan keperluan sekolah. Tapi disetiap semester pasti ada perubahan jam mengajar dan perubahan rombel sekolah. Jadi disini saya tidak menjadi guru tetap, bisa tengah semester berikutnya rombel di sekolah terpenuhi, jadi terpaksa saya mencari sekolah lain,hehe**

7. Bagaimana respon guru terhadap penerapan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Baik massss,, ya karna itu sudah mnjadi syarat sertifikasi**

8. Apakah manfaaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?

**Yaaa pastinya jumlah/syarat 24 jam tatap muka saya terpenuhi dan membantu sekolah dalam memenuhi jumlah rombel yang kurang.**

9. Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jumlah rombongan belajar yang mencukupi dan daya tampung guru di sekolah yang diperbanyak mass..**

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jarak mass, dari sekolah satu ke sekolah lain rata-rata menekan waktu karna jaraknya. Karena dalam kondisi ini menyebabkan waktu, biaya, tenaga dan pikiran habis diperjalanan.**

11. Apa saja solusi dari bapak dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dan meningkatkan daya tampung sekolah dengan bertambahnya jumlah peserta didik dan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.**

**Transkrip Wawancara Waka Kurikulum dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta**

Hari/Tanggal : Kamis 12 Mei 2016  
Waktu : 11.00  
Tempat : SMK N 2 Depok Sleman  
Narasumber : Drs. Sriyana  
Tema : Implementasi kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Kami sebagai pihak sekolah sebagai pemberi informasi mengenai sertifikasi, mengarahkan bagi guru-guru yang 24 jam mengajar belum terpenuhi.**
2. Apakah ada jam tambahan mengajar disekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Ada mas.. Seperti yang dituangkan dalam pp 74 tahun 2008 pada pedoman perhitungan beban mengajar guru diluar jam mengajar mata pelajaran serta yang dituangkan dalam SKB 5 menteri mas. Jam tambahan selain mata pelajaran khusus yang sudah ditentukan. Jadi semua yang diluar itu sah diatur dan termasuk dalam hitungan jam mengajar.**
3. Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Mencari jam keluar dari dari satuan pendidikan lain. Selain itu menjadi tugas tambahan yang sudah ditentukan. Seperti menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala perpustakaan dan lainnya yang sudah ditentukan di PP 74 tahun 2008. Selain itu dalam Permendiknas No. 30 tahun 2011 tentang aturan jam tambahan**
4. Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?

Sudah mass.. di sekolah sudah terpenuhi dan berjalan sesuai jadwal dan keperluan sekolah. Tapi disetiap semester pasti ada perubahan jam mengajar dan perubahan rombel sekolah. Jadi disini guru dari sekolah lain yang memenuhi jam disekolah tidak menjadi guru tetap sekolah, jadi tergantung kebutuhan tiap semester di sekolah. Kalau sekolah disemester berikutnya membutuhkan maka sekolah akan menerima pengajar dari sekolah lain.

5. Bagaimana respon guru terhadap penerapan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Baik massss,, ya karna itu sudah mnjadi syarat sertifikasi**

6. Apakah manfaaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?

**Bagi guru sertifikasi sendiri 24 jam tatap muka terpenuhi mas. Kalau dari pihak sekolah sendiri tercukupinya jam mengajar guru yang sebelumnya belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar/kelas.**

7. Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jumlah rombongan belajar yang cukup serta meningkatkan daya tampung mengajar guru. Jadi guru cukup memenuhi di sekolah asal tidak perlu mencari jam tambahan disekolah lain.**

8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jarak, tenaga, waktu serta pikiran mas. Masalah tersebut sering terjadi di daerah terpencil dengan jarak satu sekolah dengan yang lain lumayan jauh mas. Beda halnya diperkotaan mas, masalah tersebut dapat diminimalisir.**

9. Apa saja solusi dari bapak/ibu dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dan meningkatkan daya tampung sekolah dengan bertambahnya jumlah peserta didik dan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.**

## **Transkrip Wawancara Dinas Pendidikan dalam Menerapkan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi**

Hari/Tanggal : Rabu 18 Mei 2016

Waktu : 10.00

Tempat : Dinas Pendidikan Kota Sleman

Narasumber : Sugeng Saifudin

Tema : Implementasi kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Kami sebagai pihak sekolah sebagai pemberi informasi mengenai sertifikasi, mengarahkan bagi guru-guru yang 24 jam mengajar belum terpenuhi.**
2. Apakah ada jam tambahan mengajar disekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Dalam Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008, Permendiknas No. 30 tahun 2011 tentang pedoman perhitungan beban mengajar guru diluar jam mengajar mata pelajaran serta yang dituangkan dalam SKB 5 menteri mas. Jam tambahan selain mata pelajaran khusus yang sudah ditentukan. Jadi semua yang diluar itu sah diatur dan termasuk dalam hitungan jam mengajar.  
Bagi guru yang tidak ada tugas khusus dan 24 jam tatap muka harus mengajar disekolah lain**
3. Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?  
**Mencari jam keluar dari dari satuan pendidikan lain. Selain itu menjadi tugas tambahan yang sudah ditentukan. Seperti menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala perpustakaan dan lainnya yang sudah ditentukan di PP 74 tahun 2008.**
4. Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?  
**Sudah mass.. di sekolah sudah terpenuhi dan berjalan sesuai jadwal dan keperluan sekolah. Tapi disetiap semester pasti ada perubahan jam mengajar dan perubahan rombongan belajar sekolah. Jadi**

disini guru dari sekolah lain yang memenuhi jam disekolah tidak menjadi guru tetap sekolah, jadi tergantung kebutuhan tiap semester di sekolah. Kalau sekolah disemester berikutnya membutuhkan maka sekolah akan menerima pengajar dari sekolah lain.

5. Bagaimana respon guru terhadap penerapan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Baik massss,, ya karna itu sudah menjadi syarat sertifikasi**

6. Apakah manfaaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?

**Bagi guru sertifikasi sendiri 24 jam tatap muka terpenuhi mas. Kalau dari pihak sekolah sendiri tercukupinya jam mengajar guru yang sebelumnya belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar/kelas.**

7. Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jumlah rombongan belajar yang cukup serta meningkatkan daya tampung mengajar guru. Jadi guru cukup memenuhi di sekolah asal tidak perlu mencari jam tambahan disekolah lain.**

8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Jumlah peserta didik dan rombongan belajar terlalu sedikit**

**Jam pelajaran dalam kurikulum yang sedikit**

**Jumlah guru di satu sekolah untuk mata pelajaran tertentu terlalu banyak**

**Sekolah pada daerah terpencil atau sekolah khusus**

9. Apa saja solusi dari bapak/ibu dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?

**Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dan meningkatkan daya tampung sekolah dengan bertambahnya jumlah peserta didik dan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.**



### Hasil Wawancara Yang Telah Direduksi

Informan ( Guru Smk N 2 Depok Sleman )	Reduksi Peneliti	Tema
<p>➤ Bagaimana keterlibatan Bapak/ibu dalam menerapkan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?</p> <p><b>Kami sebagai pihak sekolah sebagai pemberi informasi mengenai sertifikasi, mengarahkan bagi guru-guru yang 24 jam mengajar belum terpenuhi.</b></p>	Informan terlibat langsung dalam proses pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi	Keterlibatan guru sertifikasi
<p>➤ Apakah ada jam tambahan mengajar disekolah selain mata pelajaran pokok yang ada di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?</p> <p><b>Ada mas.. Seperti yang dituangkan dalam pp 74 tahun 2008 pada pedoman perhitungan beban mengajar guru diluar jam mengajar mata pelajaran serta yang dituangkan dalam SKB 5 menteri mas. Jam tambahan selain mata pelajaran khusus yang sudah ditentukan. Jadi semua yang diluar itu sah diatur dan termasuk dalam hitungan jam mengajar.</b></p>	Guru Smk Negeri 2 Depok Sleman memenuhi jam mengajar di sekolah lain dan diluar sekolah lain diluar jam tambahan khusus	Jam tambahan diluar sekolah dan jam tambahan khusus di sekolah
<p>➤ Bagaimanakah guru yang belum memenuhi jam</p>	Adanya jam tambahan khusus yang sudah sesuai	Ketentuan pembagian jam

<p>mengajar di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?</p> <p><b>Mencari jam keluar dari dari satuan pendidikan lain. Selain itu menjadi tugas tambahan yang sudah ditentukan. Seperti menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala perpustakaan dan lainnya yang sudah ditentukan di PP 74 tahun 2008. Selain itu dalam Permendiknas No. 30 tahun 2011 tentang aturan jam tambahan</b></p>	<p>dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2011</p>	<p>tambahan yang sesuai ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2011</p>
<p>➤ Apakah pembagian jam mengajar guru di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada?</p> <p><b>Sudah mass.. di sekolah sudah terpenuhi dan berjalan sesuai jadwal dan keperluan sekolah. Tapi disetiap semester pasti ada perubahan jam mengajar dan perubahan rombel sekolah. Jadi disini guru dari sekolah lain yang memenuhi jam disekolah tidak menjadi guru tetap sekolah, jadi tergantung kebutuhan tiap semester di sekolah. Kalau sekolah disemester berikutnya membutuhkan maka sekolah akan menerima pengajar dari sekolah lain.</b></p>	<p>Pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi disekolah telah terpenuhi dengan baik</p>	<p>Terpenuhinya jam mengajar guru di sekolah</p>

<p>➤ Bagaimana respon guru terhadap penerapan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?</p> <p><b>Baik massss,, ya karna itu sudah mnjadi syarat sertifikasi</b></p>	<p>Respon guru sertifikasi dalam pemenuhan jam mengajar baik</p>	<p>Respon guru terhadap pemenuhan jam mnegajar</p>
<p>➤ Apakah manfaat yang didapatkan guru dalam pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta yang sudah terpenuhi?</p> <p><b>Bagi guru sertifikasi sendiri 24 jam tatap muka terpenuhi mas. Kalau dari pihak sekolah sendiri tercukupinya jam mengajar guru yang sebelumnya belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar/kelas.</b></p>	<p>Terpenuhinya jam mengajar guru sertifikasi dengan pembagian jumlah rombel dan daya tampung guru yang cukup</p>	<p>Manfaat terpenuhinya jam mengajar guru sertifikasi</p>
<p>➤ Apasaja faktor pendukung penerapan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?</p> <p><b>Jumlah rombongan belajar yang cukup serta meningkatkan daya tampung mengajar guru. Jadi guru cukup memenuhi di sekolah asal tidak perlu mencari jam tambahan di sekolah lain.</b></p>	<p>Faktor pendukung pemenuhan jam mengajar disekolah telah terpenuhi dengan baik</p>	<p>Faktor pendukung pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi</p>
<p>➤ Apa saja kendala yang dihadapi dalam</p>	<p>Kendala pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi</p>	<p>Kendala pemenuhan jam</p>

<p>menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?</p> <p><b>Jarak, tenaga, waktu serta pikiran mas. Masalah tersebut sering terjadi di daerah terpencil dengan jarak satu sekolah dengan yang lain lumayan jauh mas. Beda halnya diperkotaan mas, masalah tersebut dapat diminimalisir.</b></p> <p>➤ Apa saja solusi dari bapak/ibu dalam menerapkan jam mengajar guru sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta?</p> <p><b>Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dan meningkatkan daya tampung sekolah dengan bertambahnya jumlah peserta didik dan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.</b></p>	<p>telah terpenuhi dengan baik</p> <p>Solusi pemenuhan jam mengajar disekolah dapat terselesaikan dengan baik</p>	<p>mengajar guru sertifikasi</p> <p>Solusi pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi</p>
--	---	--

#### LAMPIRAN 4

### **Dokumentasi Foto**



Gambar 4. Lokasi Penelitian



Gambar 5. Gerbang Sekolah



Gambar 6. Halaman Sekolah



Gambar 7. Lobi Sekolah



Gambar 8. Wawancara Waka Kurikulum



Gambar 9. Wawancara Guru Sertifikasi    Gambar 10. Wawancara Guru Sertifikasi

## LAMPIRAN 5

# **Surat Ijin Penelitian**





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telpn (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611  
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas fip@uny.ac.id

Nomor : 2148 /UN34.11/PL/2016  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan izin Penelitian

21 Maret 2016

Yth. Bupati Sleman  
Cq. Kepala Kantor Kesbang Kabupaten Sleman  
Jalan Candi Gebang , Beran , Tridadi, Sleman  
Phone (0274) 868504 Fax. (0274) 868945  
Sleman

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Wakit Nurdiansah  
NIM : 09110244015  
Prodi/Jurusan : KEBIJAKAN PENDIDIKAN/FSP  
Alamat : Blimbing 01/03 Purwantoro Wonogiri

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi  
Lokasi : SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta  
Subyek : Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru  
Obyek : Pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi  
Waktu : Maret-April 2016  
Judul : Implementasi Kebijakan Pemenuhan jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Rektor ( sebagai laporan)
  2. Wakil Dekan I FIP
  3. Ketua Jurusan FSP FIP
  4. Kabag TU
  5. Kasubbag Pendidikan FIP
  6. Mahasiswa yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 23 Maret 2016

Nomor : 070 /Kesbang/2009/2016  
Hal : Rekomendasi  
Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Bappeda  
Kabupaten Sleman  
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan FIP UNY  
Nomor : 2148/UN34.11/PL/2016  
Tanggal : 21 Maret 2016  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA" kepada:

Nama : Wakti Nurdiansah  
Alamat Rumah : Blimbing Purwantoro Wonogiri Jateng  
No. Telepon : 081915522331  
Universitas / Fakultas : UNY / FIP  
NIM / NIP : 09110244015  
Program Studi : S1  
Alamat Universitas : Karangmalang Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : SMKN 2 Depok Sleman  
Waktu : 23 Maret - 23 Mei 2016

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

  
Drs. A.R. DANI  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19630511 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1276 / 2016

TENTANG  
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,  
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman  
Nomor : 070/Kesbang/2009/2016  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 23 Maret 2016

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : WAKIT NURDIANSAH  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09110244015  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Karangmalang Yogyakarta  
Alamat Rumah : Blimbing Purwanto Wonogiri Jateng  
No. Telp / HP : 081915522331  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU  
SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA  
Lokasi : SMK N 2 Depok Sleman  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 23 Maret 2016 s/d 22 Juni 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 23 Maret 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
4. Camat Depok
5. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kec. Depok
6. Ka. SMK N 2 Depok Sleman
7. Dekan FIP UNY
8. Yang Bersangkutan

Sekretaris  
Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan  
SERNY MARYATUN, S.I.P, MT  
Pembina, IV/a  
NIP 19720411 199603 2 003





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
**SMK NEGERI 2 DEPOK**  
Mrican ,Caturtunggal ,Depok ,Sleman Telp. 513515 Fax. 513438  
E-mail : smkn2depok@yahoo.com  
YOGYAKARTA 55281

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 0964

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Sleman, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : WAKIT NURDIANSAH  
No.Induk Mahasiswa : 09110244015  
Prodi / Tingkat : Kebijakan Pendidikan / FSP  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian pada tanggal 6 April - 21 Juni 2016 dengan judul  
“ Implementasi Kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK N 2  
Depok Sleman Yogyakarta “.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Sleman, 21 Juni 2016  
Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria M.Pd  
Pembina , IV/a  
NIP. 19630203 198803 1 010

